



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar

Tahun



2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

0811 4484 445

@bpspl_makassar



bpsplmakassar

BPSPL Makassar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja Tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian pada Tahun 2025. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

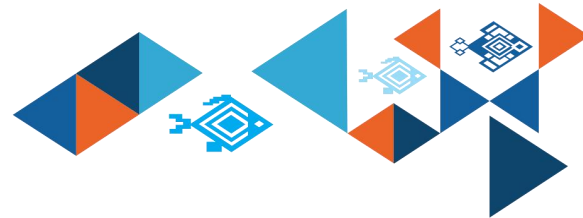
Maros, 23 Januari 2025

**Kepala Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut
Makassar**



Ditandatangani
Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik Triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja (LKj) tahun 2025 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada laporan ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 terdiri atas 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Tahun 2025 adalah **110,23** dengan predikat kinerja **"Istimewa"**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKU 1) Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% / realisasi empat (4) dari target empat (4) provinsi.

(IKU 2) Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 175% atau 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi puluh (70) dari target empat puluh (40) orang.

(IKU 3) Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 200% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi sepuluh (10) dari target lima (5) jenis.

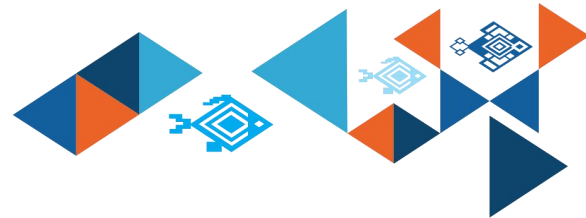
(IKU 4) Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 124,89% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan satu (99,91) dari target delapan puluh (80).

(IKU 5) Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% / realisasi dua (2) dari target dua (2) dokumen.

(IKU 6) Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% / realisasi satu (1) dari target satu (1) dokumen.

(IKM 7) Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 131,42% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi sembilan puluh dua (92) dari target tujuh puluh (70).





(IKM 8) Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 100,82% / realisasi delapan puluh Sembilan koma tujuh tiga (89,73) dari target delapan puluh sembilan (89).

(IKM 9) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 139,86% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi seratus (100) dari target tujuh puluh satu koma lima (71,5).

(IKM 10) Laporan SPIP yang disusun di lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% / realisasi empat (4) dari target empat (4) dokumen.

(IKM 11) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 112,28% / realisasi delapan puluh Sembilan koma delapan dua (89,82) dari target delapan puluh (80).

(IKM 12) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 105% / realisasi serratus (100) dari target Sembilan puluh lima (95).

(IKM 13) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar telah mencapai target dengan % capaian 100% / realisasi serratus (100) dari target seratus (100).

(IKM 14) Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 116,55% / realisasi delapan puluh tujuh koma empat satu (87,41) dari target tujuh puluh lima (75).

(IKM 15) Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 121,43% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi delapan puluh lima (85) dari target tujuh puluh (70).

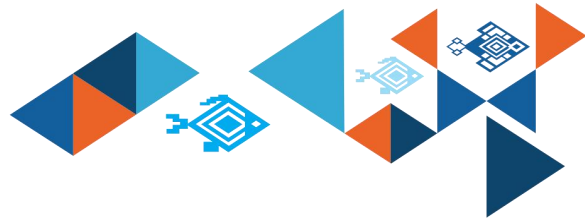
(IKM 16) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 131,58% 120 % pada aplikasi kinerjaku / realisasi serratus (100) dari target tujuh puluh enam (76).

(IKM 17) Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar telah melampaui target dengan % capaian 109,89% / realisasi serratus (100) dari target Sembilan puluh satu (91).

Total pagu anggaran tahun 2025 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 41.799.323.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNPB dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 22.481.069.592,-** atau dengan presentase sebesar **53,78%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir . Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 64,64%** Dimana ada blokir sebesar **Rp. 7.020.108.000,-**.

Di balik capaian kinerja tahun 2025 yang memperoleh predikat “Istimewa”, BPSPL Makassar menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks seiring perubahan kebijakan organisasi dan tata kerja UPT bidang penataan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025. Tantangan tersebut semakin besar dengan bertambahnya wilayah kerja dari 6 (enam) provinsi di Pulau Sulawesi menjadi 9 (sembilan) provinsi yang mencakup Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, yang memiliki karakteristik biofisik, sosial, dan tata ruang yang beragam. Selain itu, jumlah SDM ASN mengalami penurunan dari 68 (enam puluh delapan) orang pada tahun 2025 menjadi 56 (lima



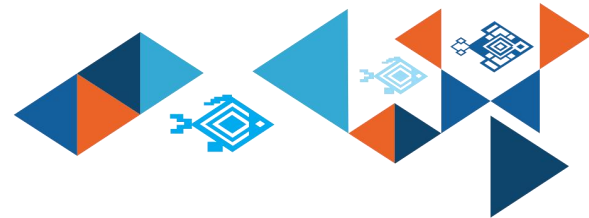


puluh enam) orang pada tahun 2026, sehingga berdampak pada peningkatan beban kerja dan perlunya penguatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, seiring dengan bertambahnya luas wilayah kerja, BPRL Makassar perlu memperkuat sistem digital spasial terintegrasi yang menghubungkan data zonasi, konservasi, dan perizinan secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Penguatan kapasitas SDM juga perlu dilakukan melalui pelatihan teknis, antara lain di bidang GIS, AMDAL, pengoperasian drone, dan pemodelan hidro-oseanografi. Selain itu, diperlukan penambahan petugas untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan KKPRL agar tetap efektif dan tepat waktu.

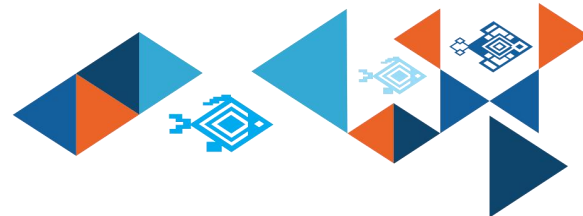
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
.....	9
I. PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3 Tugas dan Fungsi.....	9
1.4 Organisasi.....	10
1.6 Sistematika Penyajian.....	13
.....	15
II. PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis 2025-2029.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT.....	26
2.4 Postur Anggaran 2025.....	27
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Capaian kinerja.....	30
3.1.1 IKU1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi).....	30
3.1.2 IKU2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar.....	43
3.1.3 IKU3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL MakassarDokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen).....	45
3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai).....	53
3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen).....	59
3.1.6 IKU5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen).....	63
3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai).....	65
3.1.9 IK9 N ilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai).....	73
3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen).....	75
3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks).....	76
3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%).....	80
3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%).....	82
3.1.13 IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai).....	84
3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai).....	86
3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%).....	89



3.1.16	IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	90
3.2	Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)	93
3.3	Akuntabilitas Keuangan	96
IV. PENUTUP		100
4.1	Kesimpulan	100
4.2	Rekomendasi	102
4.3	Tindak Lanjut	102



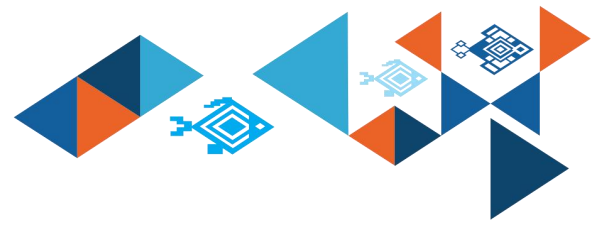


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar	12
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	19
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025	21
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025	24
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025	27
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW IV Tahun 2025	28
Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	30
Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	43
Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	45
Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4	54
Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5	59
Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5	63
Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	66
Tabel 14. Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71
Tabel 15. Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	74
Tabel 16. Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	75
Tabel 17. Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	79
Tabel 18. Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	81
Tabel 19. Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	83
Tabel 20. Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	84
Tabel 21. Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	87
Tabel 22. Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan	89
Tabel 23. Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	91
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL	93
Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025	96
Tabel 26. Tindak lanjut atas rekomendasi TW III Tahun 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar	10
Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025	12
Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahkan Presiden serta Agenda Perubahan	15
Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku	28
Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar	47



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar di Tahun 2025

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 37/MEN/2021 Tanggal 6 September 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.65/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut. Berkedudukan di Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi

Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2025.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

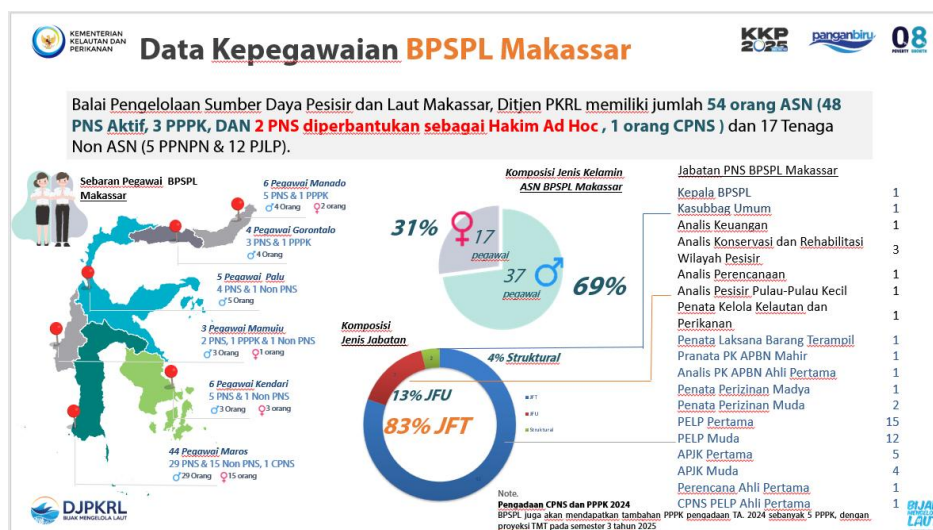
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon IV A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

- A. Sub Bagian umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Penata Laksana Barang Terampil 1 (satu) orang, Pranata PK APBN Mahir 2 (Dua) orang, dan Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama. Pada Sub Bagian Umum juga terdapat kelompok jabatan fungsional umum yang terdiri dari Analis Perencana 1 (satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini baru ada 1 (satu) orang petugas fungsional tertentu Perencana Ahli Pertama yang membantu tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi, selebihnya dibantu oleh tim kelompok jabatan fungsional tertentu dalam bidang teknis.
- B. Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut & Pesisir (PELP) dengan jumlah 28 (Dua Puluh Delapan), Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) dengan jumlah 9 (Sembilan) orang. Penata Perizinan dengan jumlah 3 (tiga) orang dan fungsional umum dengan jumlah 3 (tiga) orang. Kelompok jabatan fungsional tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 12 (dua belas) orang fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda dan 1 (Satu) orang Fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) yang masih berstatus CPNS , 6 (enam) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, 4 (empat) orang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Konservasi dan Rehabilitasi, 1 (satu) orang Analis Pulau-Pulau Kecil dan 1 (satu) orang Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.

Berikut ini adalah jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar tahun 2025:



Gambar 2. Jumlah dan sebaran staf BPSPL Makassar Tahun 2025

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Tabel 1. Komposisi jenjang Pendidikan pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)						P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
D3	2	1					1	4
D4				3				3
S1	9	15	1	4			4	33
S2		1	1	6	7	1		16
Jumlah Total	11	17	2	13	7	1	5	56

Pada Tahun 2025, jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 54 (Lima Puluh Empat) orang yang terdiri dari 50 (Empat Puluh Sembilan) PNS, 1 (Satu) CPNS dan 3 (tiga) orang P3K. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2025 adalah sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 3 (Tiga) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 2. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNBP.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNBP di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi antara lain:

1. Pada awal tahun, DIPA BPSPL Makassar terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 7.020.108.000,- pada kegiatan 1) Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut 2) Sosialisai, verifikasi dan pengendalian PKKPR 3) Identifikasi Perizinan Pulau-Pulau Kecil terblokir dan Pemeliharaan Gedung dan bangunan pada dukungan manajemen.
2. Adanya pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sampai dengan

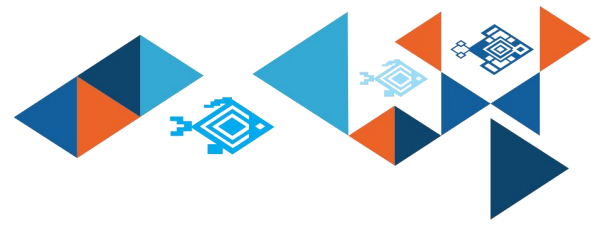


- terbitnya surat persetujuan dari Menteri KKP Dimana proporsi paling besar kegiatan teknis bersumber dari dana PLN (Program Lautra). Anggaran dari sumber PLN baru kembali dibuka diakhir periode semester I sehingga kegiatan baru disusun kembali perencanaannya.
3. Dengan adanya blokir dan pemberhentian sementara penggunaan dana PLN sangat berdampak pada pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pelayanan perizinan maupun kegiatan teknis lainnya.
 4. Komposisi anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025, 62,27% nya berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) atau 94,38% dari anggaran kegiatan teknis, yang mana kegiatan PLN tersebut untuk menunjang kegiatan LAUTRA.
 5. Proporsi yang besar pada kegiatan lautra/PLN mempengaruhi fleksibilitas pelaksanaan kegiatan, Dimana dari 6 wilayah kerja hanya 4 wilayah kerja yang merupakan Lokasi kegiatan lautra.
 6. Kegiatan Survey Biota Perairan di luar wilayah kegiatan Lautra tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak adanya anggaran padahal kegiatan tersebut sangat menunjang data dukung pengusulan kuota pengambilan alam di tahun berikutnya.
 7. Persiapan pengalihan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Perairan kepada KKP diperlukan penunjang sarpras dan SDM khususnya di UPT.
 8. Kegiatan bidang konservasi di luar Lokasi LAUTRA khususnya terkait dengan pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Konservasi sebagai salah satu Upaya peningkatan EVIKA sulit untuk dilaksanakan.
 9. Belum dibedakan kedalaman data untuk permohonan KKPRRL antara pemohon yang akan memanfaatkan ruang laut untuk skala dan resiko kecil dengan skala dan resiko besar.
 10. Belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.
 11. Masih adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunnya potensi PNBP.
 12. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
 13. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan, kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Tahun 2025**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun





sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.

B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2025 dan penetapan kinerja Tahun 2025 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.



II. PERENCANAAN KINERJA

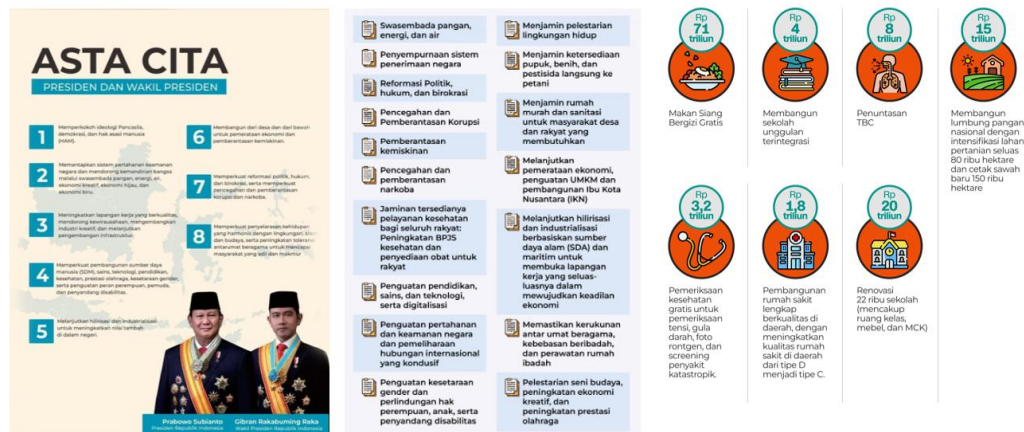
2.1 Rencana Strategis 2025-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2025-2029, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memuat tentang Visi, Misi, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti pada Gambar berikut:

VISI PRESIDEN

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)



Gambar 3. Visi, Misi, dan Arahan Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-20245. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan.

Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN tahun 2025-2029 juga mendasi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus



fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045, demikian disebutkan dalam dokumen narasi RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres nomor 12 tahun 2025.

Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun



2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSPL Makassar Tahun 2025 telah disusun secara selaras dan berjenjang dengan arah kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Renstra 2025–2029, serta mendukung langsung target kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) periode 2025–2029.

Pada level kementerian, Renstra KKP 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan ekonomi biru, pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel. IKU BPSPL Makassar Tahun 2025 yang mencakup peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Terhadap Draft Renstra DJPK 2025–2029, IKU BPSPL Makassar selaras dengan sasaran peningkatan efektivitas kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati laut. Target fasilitasi evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan jenis dilindungi/CITES, serta peningkatan kapasitas masyarakat merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap indikator kinerja DJPK dalam penguatan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan.

Sementara itu, terhadap Draft Renstra DJPRL 2025–2029, IKU BPSPL Makassar terkait identifikasi dan pendayagunaan pulau-pulau kecil serta dukungan tata kelola ruang laut menunjukkan keterpaduan dengan arah kebijakan pengelolaan ruang laut berbasis perencanaan dan daya dukung lingkungan.

Selain aspek teknis program, indikator tata kelola seperti nilai SAKIP, SPIP, Zona Integritas (WBK), Indeks Profesionalitas ASN, dan Keterbukaan Informasi Publik mencerminkan dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP dan Renstra Ditjen lingkup Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Dengan demikian, IKU BPSPL Makassar Tahun 2025 telah menunjukkan keselarasan vertikal (cascading kinerja) dari tingkat kementerian hingga unit pelaksana teknis, serta mendukung secara terukur implementasi Renstra KKP dan Draft Renstra DJPK serta DJPRL Tahun 2025–2029.

Sebagai tindak lanjut visi dan misi Presiden serta RPJMN Tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyusun Rencana Strategis

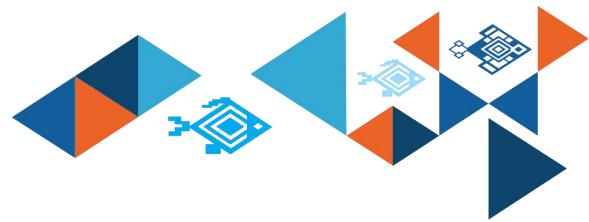


(RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang saat ini **masih dalam tahap finalisasi rancangan**. Renstra KKP Tahun 2025-2029 yang nanti akan disahkan akan menjadi dasar dari penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) serta akan menjadi pedoman bagi BPSPL Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

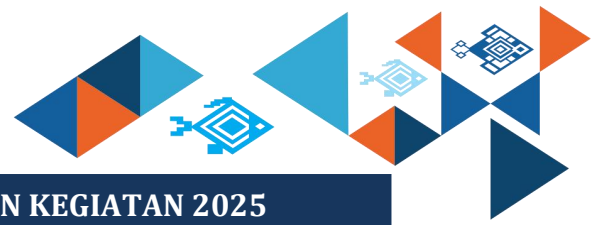
Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2025 terdapat total 17 Indikator Kinerja, jumlah ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2024 yang berjumlah 22. Berikut adalah detail perbandingan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2024 dan 2025:

Pada tahun 2025 Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Makassar mengalami 2 kali perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal BPSPL Makassar ditetapkan pada 24 Januari 2025 masih mengacu pada struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dengan jumlah indikator sejumlah 16 Indikator Kinerja dan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.810.520.000 yang berasal dari 4 kegiatan yakni Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penataan Ruang Laut, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Revisi pertama perjanjian kinerja BPSPL Makassar ialah melakukan revisi perjanjian kinerja untuk Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL). Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan ditetapkan pada 30 Juni Tahun 2025, dengan perubahan adanya tambahan IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai) dengan target sejumlah 80, dan pengurangan IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen) sehingga indikator kinerja pada Perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berjumlah 16 Indikator. Jumlah anggaran pada perjanjian kinerja juga mengalami perubahan menjadi 38.935.520.000 dan berasal dari kegiatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Sedangkan perjanjian kinerja dengan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPRL) dengan satu indikator kinerja yakni Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.875.000.000,-. Revisi perjanjian kinerja ke dua pada BPSPL Makassar dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPRL) pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) ada perubahan target pada indikator Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang) yang semula target 175 menjadi 40 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 37.898.547.000,-. Sedangkan untuk Perjanjian dengan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPRL) hanya terdapat perubahan anggaran menjadi Rp3.900.776.000,-



Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
1	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Makassar	-	
2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	
5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	
6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar
7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar
9	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	-	



SASARAN KEGIATAN 2024		SASARAN KEGIATAN 2025	
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran		-
11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar
	-	1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar
	-	6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar



Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024 dan tahun 2025:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
1	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)	-	
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	-	
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	-	
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	-	
6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	-	
7	Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi	-	



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
	di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)		
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	-	
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	-	
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	-	
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)
20	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Makassar (%)	13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	-	



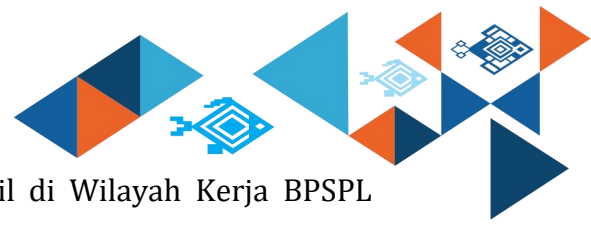
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2025	
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar (nilai)	15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)
-		1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
-		6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
-		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)
-		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
-		4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 mengalami revisi pada bulan juni dan desember, selain revisi target pada Perjanjian Kinerja Juni juga ada tambahan satu indikator kinerja sehingga total indikator kinerja yang awalnya terdiri **16 Indikator Kinerja** menjadi **17 Indikator Kinerja** adapun tambahan indikator kinerja itu adalah **Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)**, sehingga Indikator Kinerja BPSPL Makassar setelah revisi terdiri dari 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (Sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 terdapat pengurangan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 dari yang sebelumnya ada 11 IKU. Dari 11 IKU di tahun 2024 ada 3 (Tiga) IKU yang sama dan 2 (Dua) IKU Lainnya berbeda sedangkan pada Indikator Kinerja Menejerial (IKM) pada tahun 2024 dan 2025 sama sama terdapat 11 IKM, namun terdapat 2 (Dua) jenis IKM yang berbeda.

Adapun IKU yang sebelumnya terdapat di tahun 2024 dan tidak terdapat di tahun 2025 antara lain:

1. Nilai PNBSP BPSPL Makassar (Rp.)
2. Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
3. Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan





Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)

5. Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
6. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
7. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar

Adapun IKU baru di tahun 2025 yang tidak terdapat di tahun 2024 antara lain:

1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)
2. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
3. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Penambahan dan pengurangan indikator seperti dijelaskan diatas dikarenakan beberapa faktor anatara lain:

1. Adanya perubahan komposisi anggaran pada dokumen perencanaan BPSPL Makassar dimana program dan kegiatan pada tahun 2024 yang telah dilakukan tidak dapat dianggarkan dan dilaksanakan lagi dengan adanya perubahan tersebut.
2. Terdapat program dan kegiatan baru pada BPSPL Makassar pada tahun 2025
3. Adanya penilaian terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi setiap indikator untuk perbaikan berkelanjutan dalam manajemen kinerja.
4. Terkait penambahan Indikator Kinerja Utama Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai) hal tersebut untuk mengakomodir target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berikut ini adalah perjanjian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	40
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80
4.	Terselenggaranya pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	70
		8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5





SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95
		13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	70
		16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76
		17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91

2.3 Keselarasan PK Eselon I dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2025 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 8 Sasaran Program, dan 11 Indikator Kinerja Program. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2025 terdiri dari Tiga Program, Enam Sasaran Kegiatan, dan 17 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah, Jenis



keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan secara berkelanjutan yang mendukung nilai efektifitas pengelolaan biota perairan, dan indikator menejemen yang ada di BPSPL Makassar mendukung capaian indikator nilai implementasi reformasi birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

2.4 Postur Anggaran 2025

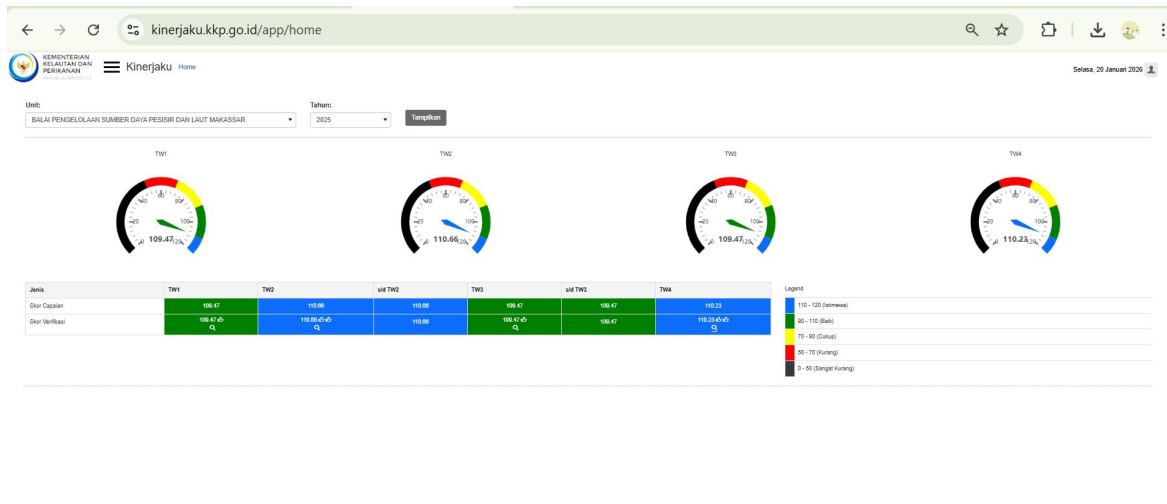
Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2025, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp 41.799.323.000,-** (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 12.509.617.000,-** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni** , **Rp. 4.500.776.000,-** (Empat Miliar Lima Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dari **PNBP** dan **Rp. 24.788.930.000,-** (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)) dari **PLN** . Dari Pagu anggaran di atas terdapat blokir anggaran sebesar Rp. Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) sehingga pagu efektif BPSPL Makassar sebesar **Rp. 34.779.215.000,-** (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) . Blokir ini terdapat di program perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, Perencanaan Ruang Laut dan Dukungan Manajemen. Berikut ini adalah tabel postur anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025.

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2025

KODE/ NAMA KEGIATAN	RUPIAH MURNI (000)	PNBP (000)	PLN (000)	TOTAL (000)	BLOKIR (000)
Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	0	300.000	24.788.930	25.088.930	6.148.568
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Keci;	0	300.000	0	300.000	55.000
Perencanaan Ruang Laut	0	875.000	0	3.900.776	505.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	13.546.590	0	0	12.509.617	311.540
Jumlah	13.546.590	1.475.000	24.788.930	41.799.323	7.020.108

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 adalah **110.23** dengan predikat **“Istimewa”**.

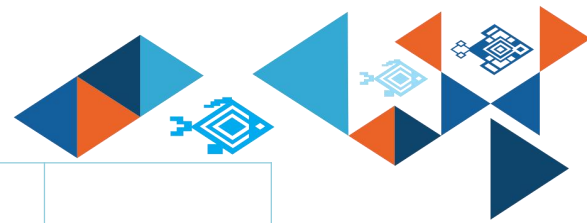


Gambar 4. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

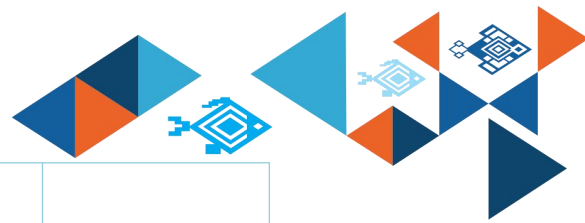
Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% capaian
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4	4	100
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	40	70	175 (120 aplikasi kinerjaku)
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5	10	200 (120 aplikasi kinerjaku)



4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80	99,91	124,89 (120 aplikasi kinerjajaku)
5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2	2	100
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1	1	100
7	(Dokumen)Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar	70	92	131,42 (120 aplikasi kinerjajaku)
8	(Nilai)Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89	89,73	100,82
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5	100	139,86 (120 aplikasi kinerjajaku)
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	4	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80	89,82	112,28
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95	100	105,26
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100	100	100
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75	87,41	116,55
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	70	85	121,43 (120 aplikasi kinerjajaku)
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP	76	100	131,58 (120 aplikasi kinerjajaku)



	lingkup BPSPL Makassar (%)			
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91	100	109,89

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja BPSPL Makassar yang dilakukan fasilitasi oleh BPSPL Makassar dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.

Adapun Capaian IKU 1 Pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian IKU 1 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar

SS -1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar					
IKU - 1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
-	4	4	100	-	-	-

A. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini Adalah 4 Provinsi sesuai dengan target. Provinsi yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah terdiri dari:

- Provinsi Sulawesi Tenggara (KKD Teluk Moramo)
Hasil penilaian evika untuk kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara khususnya KKD Teluk Moramo sebesar 60,78% Status Perak (Dikelola Optimum). Di tahun sebelumnya, KKD teluk moramo mendapatkan nilai evika sebesar 56,00 %, sehingga capaian hasil penilaian evika KKD Teluk Moramo naik sebesar 10,78 %.
- Provinsi Sulawesi Tengah (KKD Banggai Dalaka)
Hasil penilaian evika untuk kawasan konservasi di Sulawesi Tengah



khususnya KKD Banggai Dalaka sebesar 62,08 % Status Perak (Dikelola Optimum). Di tahun sebelumnya, KKD Banggai Dalaka mendapatkan nilai evika sebesar 53,49 %, sehingga capaian hasil penilaian evika KKD Banggai Dalaka naik sebesar 8,59 %.

- c) Provinsi Sulawesi Utara (KK di Perairan di Laut Sulawesi)
Tahun ini, KK di Perairan di Laut Sulawesi belum dilakukan penilaian dikarenakan KK ini baru ditetapkan di awal tahun 2025.
- d) Provinsi Gorontalo (KKD Teluk Gorontalo)
Hasil penilaian evika untuk kawasan konservasi di Provinsi Gorontalo khususnya KKD Teluk Gorontalo sebesar 44,26 dengan status Perunggu (Dikelola Minimum). Di tahun sebelumnya, KKD Teluk Gorontalo mendapatkan nilai evika sebesar 35,76 %, sehingga capaian hasil penilaian evika KKD Teluk Gorontalo naik sebesar 8,5 %.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena IKU ini tidak terdapat di tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

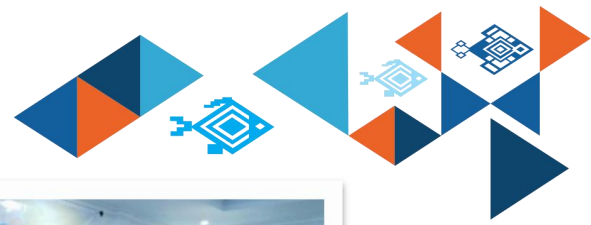
Capaian IKU Daerah yang difasilitasi melalui penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di wilayah kerja BPSPL Makassar didukung oleh terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara BPSPL Makassar dengan pemerintah daerah provinsi serta para pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut memungkinkan pelaksanaan penilaian berjalan sesuai pedoman, didukung kelengkapan data dan dokumen yang memadai, serta mendorong peningkatan kualitas pengelolaan KKD secara berkelanjutan.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan akhir tahun 2025 kegiatan pendukung yang dilaksanakan di masing-masing provinsi antara lain:

a) Provinsi Sulawesi Tenggara

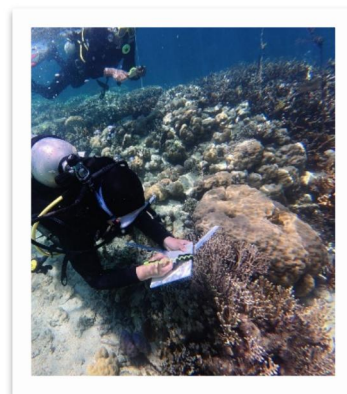
1. Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder Kawasan Konservasi
Penjangkauan Kawasan Konservasi Teluk Moramo, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Agustus 2025 dengan materi Teknik Pengawasan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat dan Rehabilitasi Mangrove berbasis Konservasi dan Ekonomi (*Sylvofishery/Wanamina*) dengan peserta sejumlah 20 Orang. Kegiatan ini berkontribusi pada meningkatnya kapasitas pengawasan, pemahaman dan komitmen masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta terbangunnya jejaring pengawasan yang lebih kuat dan terkoordinasi.



2. Kegiatan Survey Jenis Prioritas

- Monitoring Bambu Laut di KKD Teluk Moramo

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 September – 4 Oktober 2025, Titik Survei : mengacu data T0-T1 tahun 2023-2024. Hasilnya menunjukkan kelimpahan koloni bambu laut tergolong rendah dengan rata-rata 138 ind/500 m² dan didominasi ukuran kecil (0-30 cm), serta terjadi penurunan kelimpahan dari 99 ind/500 m² pada 2024 menjadi 90 ind/500 m² pada 2025 pada semua ukuran koloni, yang diduga dipengaruhi oleh pemanfaatan ilegal, sedimentasi, peningkatan makroalga, dan aktivitas penangkapan ikan yang merusak.

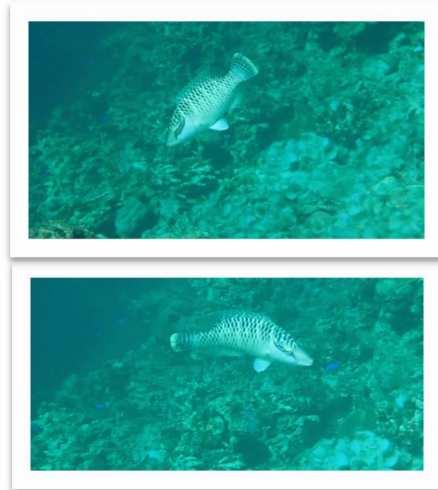
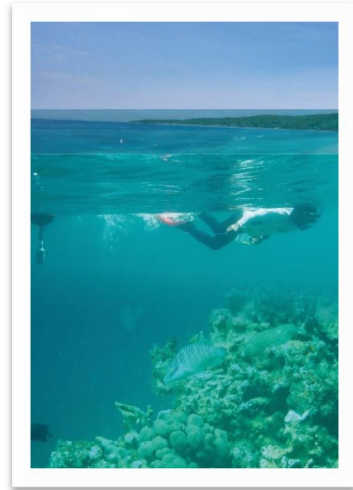


- Survey Populasi Ikan Napoleon

Kegiatan survei pendataan populasi ikan Napoleon dilakukan di perairan KKD Teluk Moramo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kab. Konawe Selatan, pada tanggal 10 - 17 Oktober 2025.

Hasilnya menunjukkan pendataan ikan napoleon di KKD Moramo melalui metode SVC sepanjang 20,02 km pada 10 stasiun menemukan 22 individu dengan kepadatan rata-rata 1,17 ind/ha (status sangat kritis), didominasi ukuran kecil 11-20 cm dan stadia juvenil sebesar 63,64%.

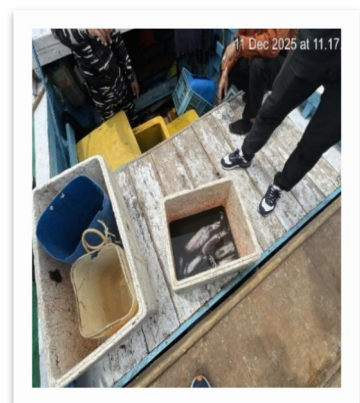




3. Kegiatan Patroli di Kawasan Konservasi

Kegiatan Patroli dilaksanakan pada 6–9 Oktober 2025, dengan rute Desa Ranooha Raya–Biluhu Timur pada hari pertama, perairan Pasi Jambe, Zona Inti I, dan Pulau Saponda pada hari kedua, serta patroli malam pada 8–9 Oktober 2025 untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di Zona Inti I dan Pulau Hari.

Hasil patroli KKD Teluk Moramo menunjukkan masih terjadinya pelanggaran tercatat sebanyak 46 pelanggaran di Tahun 2025, terutama di zona inti, akibat rendahnya pemahaman nelayan, dengan dengan tren peningkatan jumlah dan jenis pelanggaran pada 2024–2025 meski penangkapan kapal >10 GT mengalami penurunan.



4. Review Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo

Reviu Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 September. Tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain:

- 1) Melakukan evaluasi nomenklatur kawasan konservasi daerah



berdasarkan peraturan terbaru;

- 2) Melakukan evaluasi rencana pengelolaan kawasan Konservasi Daerah
- 3) Melakukan evaluasi dokumen rencana pengelolaan dengan target nilai EVIKA meningkat satu level

Rangkaian Kegiatan Review Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo antara lain: ekspose awal yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober Tahun 2025, ekspose antara pada tanggal 13 November 2025 dan ekspose akhir pada tanggal 11 Desember 2025. Output kegiatan berupa dokumen naskah akadeamin Rencana Pengelolaan KKD Teluk Moramo dan hingga saat ini, masih dalam tahap penyelesaian oleh konsultan.



5. Penyusunan Dokumen Analisa Daya Dukung dan Daya tampung KKD Teluk Maramo

Penyusunan Dokumen Analisa Daya Dukung dan Daya tampung dilaksanakan secara kontraktual. Penentuan daya dukung untuk setiap kegiatan pemanfaatan dilakukan melalui identifikasi berbagai faktor pendukung seperti data dan informasi, sarana-prasarana, skala usaha, serta alokasi ruang di kawasan konservasi dengan tetap memperhatikan tiga prinsip utama, yakni keberlanjutan proses dan fungsi kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi, keberlanjutan produktivitas kegiatan pemanfaatan, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam bidang penangkapan ikan, pendekatan dilakukan melalui estimasi potensi sumber daya ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, estimasi potensi sesaat (standing stock) melalui data sensus visual atau Underwater Visual Census (UVC), serta



analisis data pendaratan ikan (fish landing monitoring)

Untuk kegiatan pembudidayaan ikan, daya dukung ditentukan melalui identifikasi kesesuaian ruang budidaya dan kapasitas produksi (biocapacity) pada zona budidaya yang telah dialokasikan di kawasan konservasi.

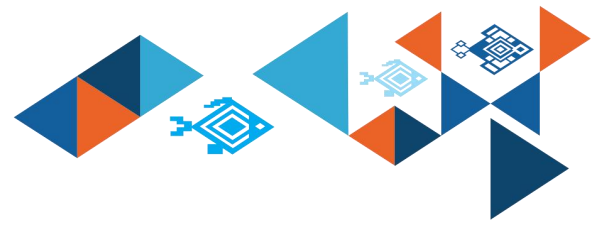
Sedangkan pada kegiatan pariwisata alam perairan, penilaian daya dukung difokuskan pada identifikasi potensi wisata bahari seperti selam, snorkeling, dan kegiatan wisata lainnya, dengan mempertimbangkan faktor pembatas yang berfungsi sebagai alat kontrol bagi pengelola dalam mekanisme pemberian izin dan pengaturan jumlah pengunjung agar tetap sesuai dengan kapasitas Lingkungan.

Rangkaian Kegiatan Review Penyusunan Dokumen dan Analisa Daya Dukung dan Daya tampung KKD Teluk Maramo antara lain: ekspose awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober Tahun 2025, ekspose antara pada tanggal 30 November 2025 dan ekspose akhir pada tanggal 12 Desember 2025. Output kegiatan berupa dokumen naskah akademik analisis daya dukung dan daya tampung KKD Teluk Moramo dan hingga saat ini, masih dalam tahap penyelesaian oleh konsultan.



b) Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder Kawasan Konservasi Penjangkauan Kawasan Konservasi Banggai Dalaka, Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 22 Agustus 2025, berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut dan Biota Laut Terdampar di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan peserta sejumlah 20 Orang.



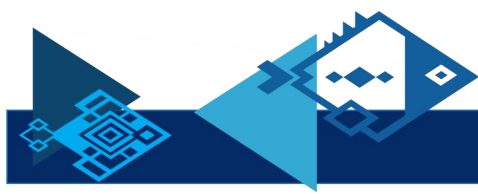
2. Survey Jenis Prioritas

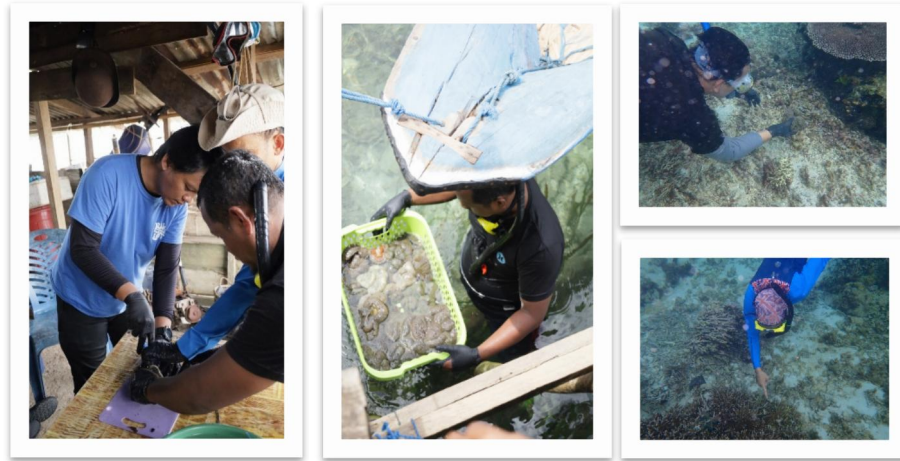
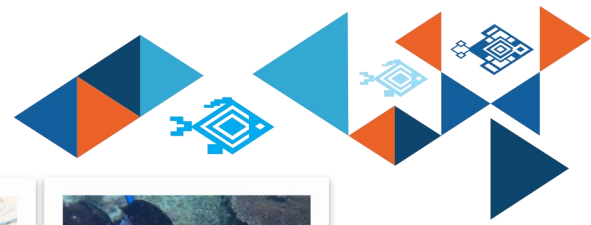
- Survei Rehabilitasi Anemon dan Banggai Cardinal Fish (BCF) di Kabupaten Banggai Laut.

Kegiatan rehabilitasi anemon BCF di Kawasan Konservasi (KK) Banggai Dalaka dilaksanakan di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 25 - 31 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan pembedahan bibit anemon yang telah disiapkan sebelumnya. Pemilihan Desa Popisi didasarkan pada kondisi sosial masyarakat yang mayoritas merupakan Suku Bajo dengan aktivitas keseharian sebagai nelayan serta pemanfaatan anemon. Pada kegiatan ini, tim BPSPL Makassar juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran anemon sebagai mikrohabitat Ikan Capungan Banggai (BCF) yang merupakan jenis ikan dilindungi.

Rehabilitasi anemon dilakukan melalui perbanyakan bibit dengan metode pembedahan indukan anemon. Proses pembedahan diawali dengan anestesi menggunakan air laut yang diberi es hingga anemon dalam kondisi tidak aktif, kemudian dilakukan pemotongan secara vertikal menjadi dua bagian menggunakan peralatan yang bersih dan steril. Anemon hasil pembedahan selanjutnya ditempatkan dalam bak ber-aerasi untuk pemulihan, dengan penambahan ikan badut guna membantu proses penyembuhan luka. Masa pemulihan berlangsung selama 7-10 hari sebelum anemon dapat dilepasliarkan.

Pada hari kedua, dilakukan monitoring kondisi anemon pasca pembedahan serta evaluasi hasil rehabilitasi anemon tahun 2024 di Desa Bonebaru, yang menunjukkan bahwa anemon hasil rehabilitasi masih terjaga dengan baik. Pada hari ketiga, dilakukan penebaran anemon yang telah pulih sepenuhnya pada 10 titik di sekitar Desa Popisi yang merupakan habitat Ikan Capungan Banggai. Anemon yang ditebar telah melalui proses penyembuhan optimal dan dinyatakan layak untuk direhabilitasi kembali ke alam. Penebaran dilakukan oleh tim dengan dukungan Yayasan Khatulistiwa Alam Lestari dan BPSPL Makassar, serta melibatkan masyarakat setempat dengan pendampingan tenaga ahli.

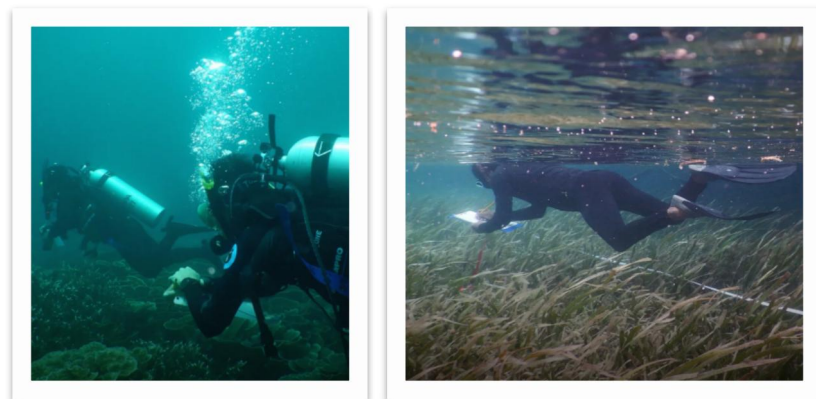


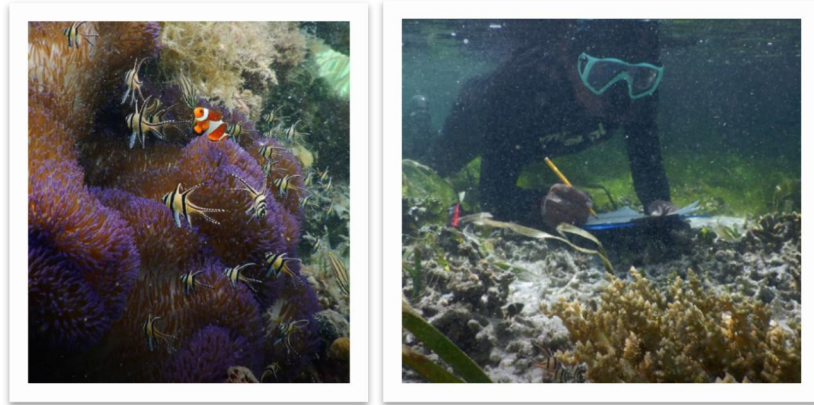
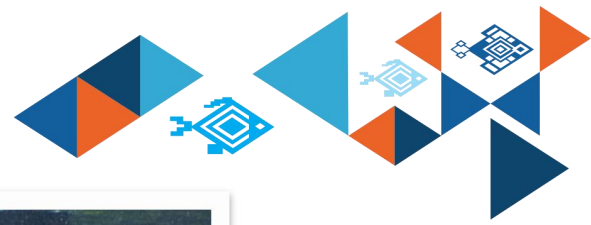


- Monitoring Jenis Ikan Dilindungi Banggai Cardinalfish (*Pterapogon kauderni*)

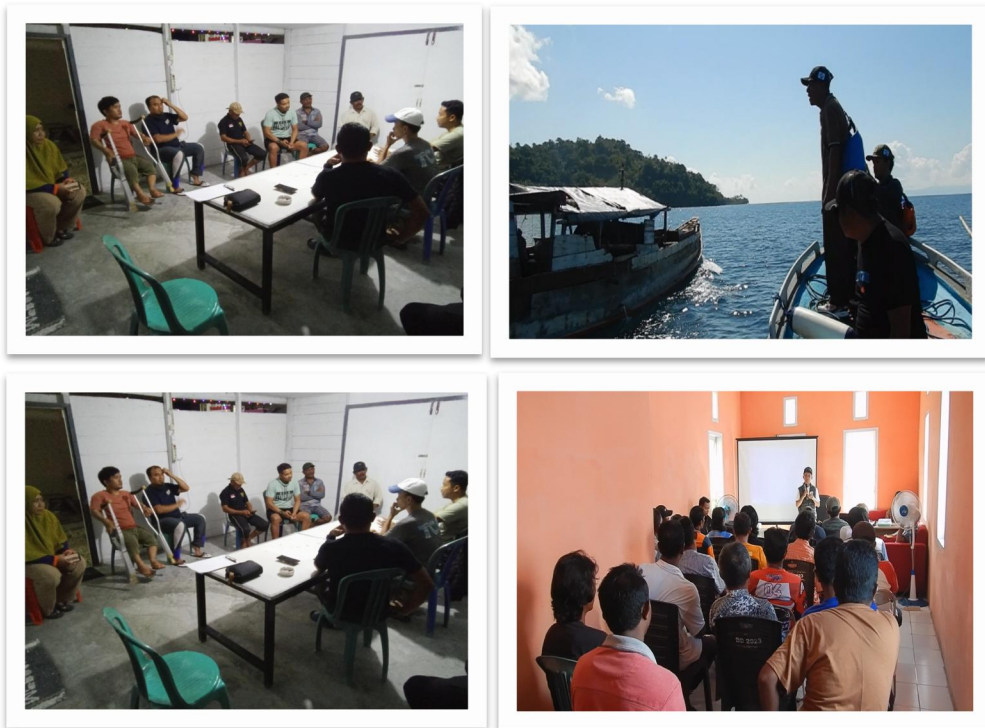
Kegiatan Monitoring Jenis Ikan Dilindungi Banggai Cardinalfish (*Pterapogon kauderni*) dilaksanakan di perairan Kecamatan Bongan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Oktober–5 November 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data populasi dan kondisi mikrohabitat BCF. Monitoring populasi dan mikrohabitat BCF dilakukan pada 8 lokasi, yaitu Toado, Mbuang-Mbuang, Melilis, Tanjung Nggasuang, Mandel, Minanga, Kombongan, dan Toropot. Hasil monitoring menunjukkan kepadatan populasi BCF per 100 m² bervariasi antar lokasi, dengan nilai tertinggi di Toado (3,93) dan terendah di Mandel (0,47).

Selain monitoring biofisik, dilakukan pula pengumpulan data sosial ekonomi melalui wawancara dengan masyarakat setempat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 tidak terdapat pemanfaatan BCF, meskipun Sulawesi Tengah masih memiliki kuota pemanfaatan sebesar 5.000 ekor. Namun demikian, pemanfaatan mikrohabitat BCF seperti anemon dan bulu babi masih berlangsung. Kondisi ini sejalan dengan hasil monitoring, di mana pada beberapa stasiun tidak ditemukan bulu babi pada area pengamatan. Kegiatan monitoring juga dilengkapi dengan pengambilan data kualitas perairan pada seluruh lokasi pengamatan yang meliputi parameter pH, suhu, dan salinitas.



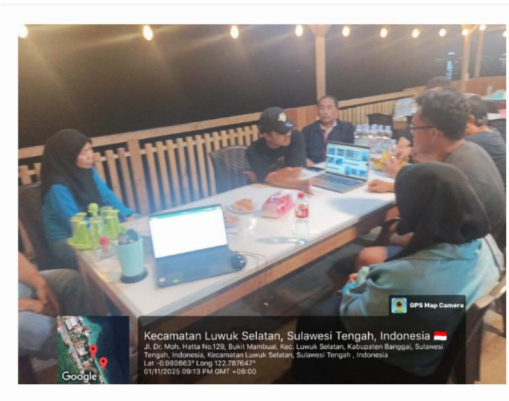


3. **Patroli Gabungan di KKD Banggai Dalaka**
Kegiatan Patroli Tahap I dilaksanakan 13-18 Oktober 2025 (Area XII) dan Patroli Tahap II tanggal 27 Nov – 1 Des 2025 (Area V – VII).
Hasil Patroli Tahap I menunjukkan masih ditemukannya aktivitas di Zona Inti, namun tingkat pengetahuan masyarakat tentang kawasan konservasi tergolong tinggi (87%). Sedangkan Pada Patroli Tahap II, aktivitas didominasi di Zona Pemanfaatan Terbatas, dengan kepatuhan rendah di Zona Inti dan zona lain. Sebagian besar responden mengetahui kawasan konservasi (91%), sedangkan 9% belum mengetahui.



4. **Penyusunan Dokumen Reviu-Update Rencana Zonasi KKD Banggai Dalaka**
Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak pada tanggal 8 Oktober 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain:
- 1) Mengintegrasikan tujuan konservasi dengan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan didasarkan pada prinsip ilmiah dan partisipasi pemangku kepentingan.

- 2) Menilai kesesuaian dokumen yang telah ada dengan ketentuan dan standar yang diatur dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020.
 - 3) Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi eksisting, efektivitas implementasi zonasi, serta kebutuhan pengelolaan ke depan.
- Tahapan Kegiatan: Ekspos Awal, Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan rencana kerja, metodologi, dan kerangka awal dokumen yang akan disusun kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Kegiatan ekspose awal dilaksanakan pada 23 Oktober 2025. Ekspose Antara, Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil peninjauan ulang terhadap peraturan dan keputusan yang berlaku serta survei lapangan yang dilakukan. Kegiatan ekspose antara dilaksanakan pada 17 November 2025. Ekspos Akhir dan Finalisasi Dokumen dilaksanakan pada 23 Desember 2025 kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil konsultasi pada kegiatan ekspos antara dan penyusunan dokumen akhir.



c) Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder Kawasan Konservasi. Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di KK Perairan di Laut Sulawesi berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut /Biota Laut yang dilaksanakan pada 20–22 Agustus 2025 di Tahuna Beach Hotel and Resort, Kabupaten Kepulauan Sangihe, melibatkan 15 peserta Pokmaswas dari empat kelompok di sekitar lokasi kegiatan dan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test dari 56% menjadi 63% (naik 7%), serta mencerminkan keterlibatan perempuan sebesar 20% dari peserta dan 37,5% dari tim pelaksana, dengan koordinator tim kerja merupakan perempuan.



d) Provinsi Gorontalo

1. Kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder Kawasan Konservasi Penjangkauan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo.

Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo dilaksanakan Pada 19-21 Agustus 2025, Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut /Biota Laut.

Sebagai tindak lanjut, SUOP KKD Teluk Gorontalo dan para pemangku kepentingan berkomitmen melakukan sosialisasi serta melibatkan masyarakat, khususnya perempuan, dalam pengelolaan kawasan konservasi.

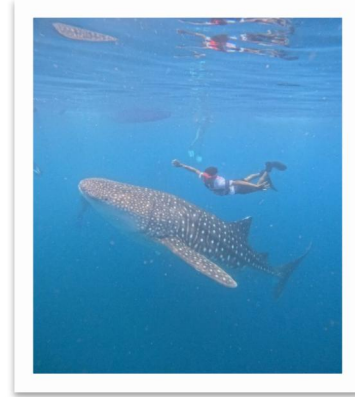
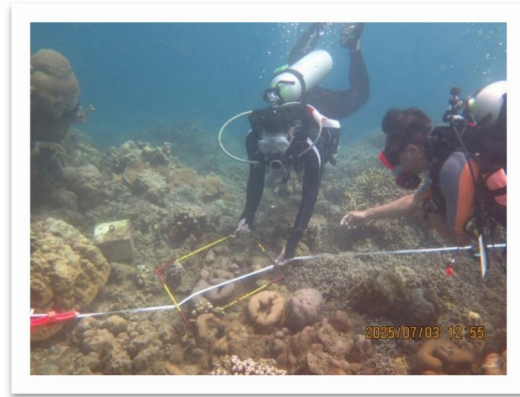


2. Survey Jenis Prioritas

- Monitoring Habitat Hiu Paus di provinsi Gorontalo

Kegiatan ini dilaksanakan pada Pada tanggal 30 Juni - 4 Juli 2025 dan 22 - 25 Agustus 2025 Kegiatan monitoring dilaksanakan melibatkan unsur dari SUOP Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, kolompok Orca. Pemantauan hiu paus di Gorontalo mencatat 7 individu pada 2025 dan total 61 individu selama 2016-2025, dengan pola migrasi semi-residensial di Teluk Tomini, serta kondisi habitat Botubarani yang optimal dan tutupan karang hidup kategori baik.





3. **Patroli Gabungan di KK Teluk Gorontalo**
Kegiatan patroli dilaksanakan dua tahap, yaitu Patroli Tahap I pada 2–3 Oktober 2025 dan Patroli Tahap II pada 11–13 Desember 2025. Patroli Tahap I mencakup rute Dermaga Talumolo–Biluhu Timur hingga Botubarani dan Olele. Patroli Tahap II berlangsung selama tiga hari dengan rute Talumolo–Biluhu Timur, Talumolo–Botubarani dan Olele disertai pemeriksaan kapal, serta patroli malam di wilayah Biluhu–Botubarani dan Olele.
- Hasil patroli menunjukkan masih terdapat pelanggaran zonasi meski kesadaran masyarakat meningkat, tanpa temuan penangkapan ikan ilegal, serta merekomendasikan penguatan sosialisasi, pengawasan reklamasi, dan peningkatan frekuensi patroli berbasis teknologi.



4. **Reviu Rencana Pengelolaan KKD Teluk Gorontalo**
Reviu Rencana Pengelolaan KKD Teluk Gorontalo dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pelaksanaan penandatanganan kontrak pada tanggal 26 September. Tujuan pelaksanaan kegiatan antara lain:
- 1) Melakukan evaluasi nomenklatur kawasan konservasi daerah berdasarkan peraturan terbaru;



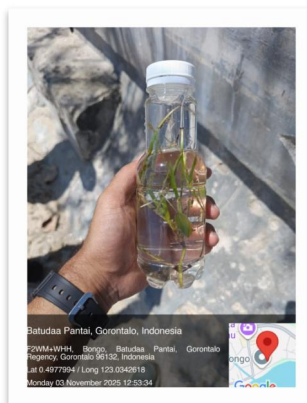
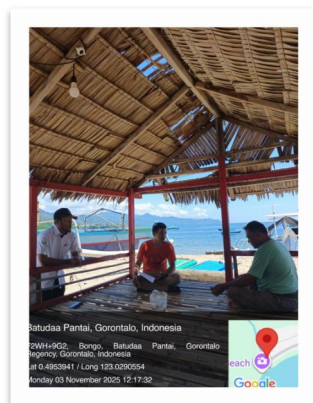
- 2) Melakukan evaluasi rencana pengelolaan kawasan Konservasi Daerah
- 3) Melakukan evaluasi dokumen rencana pengelolaan dengan target nilai EVIKA meningkat satu level

Rangkaian Kegiatan Review Rencana Pengelolaan KKD Teluk Gorontalo antara lain: ekspose awal yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober Tahun 2025, ekspose antara pada tanggal 10 November 2025 dan ekspose akhir pada tanggal 3 Desember 2025. Output kegiatan berupa dokumen naskah akademis Rencana Pengelolaan KKD Teluk Gorontalo dan hingga saat ini, masih dalam tahap penyelesaian oleh konsultan.

5. Penyusunan Dokumen dan Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung KKD Teluk Gorontalo.

Penyusunan Dokumen Analisa Daya Dukung dan Daya tampung dilaksanakan secara kontraktual. Penentuan daya dukung untuk setiap kegiatan pemanfaatan dilakukan melalui identifikasi berbagai faktor pendukung seperti data dan informasi, sarana-prasarana, skala usaha, serta alokasi ruang di kawasan konservasi dengan tetap memperhatikan tiga prinsip utama, yakni keberlanjutan proses dan fungsi kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi, keberlanjutan produktivitas kegiatan pemanfaatan, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.

Rangkaian Kegiatan Review Penyusunan Dokumen dan Analisa Daya Dukung dan Daya tampung KKD Teluk Gorontalo antara lain: ekspose awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober Tahun 2025, ekspose antara pada tanggal 30 November 2025 dan ekspose akhir pada tanggal 10 Desember 2025. Output kegiatan berupa dokumen naskah akademik analisis daya dukung dan daya tampung KKD Teluk Moramo dan hingga saat ini, masih dalam tahap penyelesaian oleh konsultan.



F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan untuk mendukung capaian IKU Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar mengacu pada indikator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA). Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, kegiatan dilaksanakan secara *on the spot* dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia, sehingga proses pengumpulan data, verifikasi lapangan, serta pendampingan daerah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan terintegrasi dengan kondisi riil di lapangan.

Meskipun hasil penilaian pada tahun berjalan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut





dipengaruhi oleh penggunaan data dukung yang masih bersumber dari kegiatan tahun sebelumnya. Namun demikian, pendekatan pelaksanaan yang efisien melalui pengaturan SDM yang proporsional dan pengendalian biaya operasional telah memastikan bahwa capaian kegiatan tetap optimal tanpa meningkatkan beban anggaran.

G. Rencana Aksi **Triwulan I Tahun 2026**

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.2 **IKU 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar**

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 2 Pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian IKU 2 Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar

SS -1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah kerja BPSPL Makassar					
IK - 2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
105	40	70	175 (120 Kinerjaku)	-35	-	-

A. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel 2 diatas dimana dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKU 2 di Tahun 2025 adalah 70 orang masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan kawasan dari target 40 orang atau 175% dari target (120% sesuai aplikasi Kinerjaku), capain 70 orang tersebut tersebar diwilayah kerja dengan rincian 20 orang di Sulawesi Tengah, 15 orang di Sulawesi Utara, 20 orang di Sulawesi Tenggara dan 15 orang di Gorontalo.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja yang sama pada tahun 2024 karena inidkator “Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas





dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)” tidak ada pada tahun 2024, namun pada tahun 2024 ada indikator yang sejenis dengan bahasa yang berbeda yaitu indikator ” Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Orang)” , apabila indikator 2025 dibandingkan dengan capaian 2025 terjadi penurunan capaian dimana capaian 2024 adalah 105 orang sedangkan capaian 2025 adalah 70 orang, terjadi penurunan capaian 35 orang.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

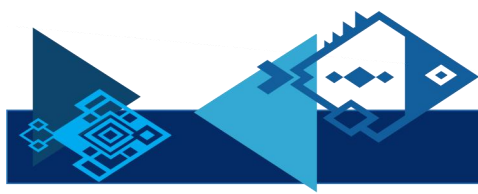
Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2025 melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 70 ((tujuh puluh) orang dari target 40 (empat puluh) orang, namun capaian tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu 105 (seratus lima) orang, penurunan tersebut dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja, dimana di tahun 2025 jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya itu terbatass hanya di 4 (empat) kawasan konservasi daerah yang masuk Lokasi kegiatan LAUTRA sedangkan tahun 2024 masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya bisa di semua kawasan konservasi daerah yang ada di Wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja utama ini adalah :

- a) Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Perairan Sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan pada tanggal 20-23 Agustus 2025, berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut dan Biota Laut Terdampar di Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan peserta sejumlah 20 Orang;
- b) Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan Pada hari Senin-Sabtu, 18-23 Agustus 2025, BPSPL Makassar melakukan kegiatan Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalian/Biota Laut Terdampar di Kab. Kepulauan Sangihe dengan jumlah peserta 15 Orang.
- c) Penjangkauan Kawasan Konservasi Teluk Moramo, Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Agustus 2025 dengan materi Teknik Pengawasan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat dan Rehabilitasi Mangrove berbasis Konservasi dan Ekonomi (Sylvofishery/Wanamina) dengan peserta sejumlah 20 Orang;
- d) Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder di Kawasan Konservasi Daerah Teluk





Gorontalo dilaksanakan Pada 19-21 Agustus 2025, Penjangkauan dan Pelibatan Stakeholder berupa Bimbingan Teknis Penanganan Mamalia Laut /Biota Laut dengan jumlah peserta 15 Orang.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini pada tahun 2025 antara Lain koordinasi dengan SUOP dan Pemerintah daerah setempat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan jenis peningkatan kompetensi yang cocok untuk dilaksanakan di kawasan konservasi daerah masing-masing.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan penjangkauan dan pelibatan stakeholder BPSPL Makassar dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dari Pencapaian target yang sesuai atau melampaui indikator kinerja dan Optimalisasi anggaran dengan capaian output lebih tinggi dibanding input.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I 2026 antara lain Melaksanakan rapat persiapan teknis kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 IKU 3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Apendiks dan Pari Apendiks);
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Napoleon, Teripang dan Sidat).

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah adalah Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Sidat, Teripang, dan Napoleon di wilayah kerja BPSPL Makassar.

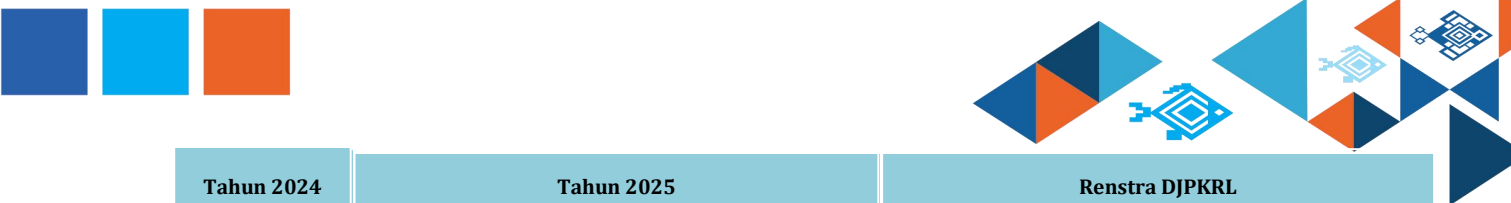
Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike spesies dan Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Adapun Capaian IKU 3 Pada Triwulan IV Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9. Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

SS -3	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar
IK - 7	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)





Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
9	5	10	200 (120 kinerjaku)	1	-	-

A. Capaian IKU Tahun 2025

Capaian IKU ini Adalah 10 Jenis atau 200% (atau 120 pada aplikasi kinerjaku) dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni 5 jenis.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja pada IKU ini antara lain:

1. Pelayanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri Dalam Negeri untuk Jenis Ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES
Sampai dengan akhir tahun 2025 telah dilakukan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau tercantum dalam daftar Apendiks CITES melalui penerbitan SAJI di wilayah kerja BPSPL Makassar sebanyak 231 dokumen yang terdiri dari 171 Dokumen SAJI DN, 56 Dokumen SAJI LN dan 4 Dokumen SAJI DN Tentengan. Penerbitan SAJI DN sampai akhir tahun 2025 diterbitkan untuk komoditas jenis Hiu Apendiks, Pari Apendiks, Sidat, BCF, Napoleon dan Arwana.
2. Pelayanan penerbitan Surat Rekomendasi (SR) Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) untuk jenis ikan kategori *look alike species*
Untuk jenis ikan kategori *look alike species* sampai dengan akhir Tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 991 dokumen yang terdiri dari 906 Dokumen SR DN dan 85 dokumen SR LN. Penerbitan SR selama Tahun 2025 diterbitkan untuk komoditas jenis Teripang, Hiu dan Pari Look alike species, Anemon dan Soft Coral.

Berikut adalah infografis pelayanan perizinan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan dan Surat Rekomendasi di wilayah kerja BPSPL Makassar selama Tahun 2025:



Gambar 5. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan Surat Rekomendasi yang paling banyak adalah dari jenis **Soft Coral** dengan total surat rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **423 Rekomendasi**, disusul teripang, anemone, dan Hiu Pari *Look Alike Species*. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak 156 dokumen SAJI (SAJI DN 122, SAJI LN 34), disusul dengan sidat, Napoleon, BCF dan Arwana.

Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KSG. Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KSG walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada tahun 2025 naik 1 angka dibandingkan dengan capaian tahun 2024, Dimana pada tahun ini capaian yang diperoleh Adalah 10 jenis antara lain Arwana, BCF, Napoleon, Hiu, Napoleon, Pari, Sidat, Teripang, anemon, soft coral dan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 9 jenis adalah Hiu Appendix, Pari Appendix, Sidat, Teripang, Napoleon, BCF, Soft Coral, Anemon, dan Arwana.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Berdasarkan perbandingan dengan target Renstra 2025–2029, capaian IK-4 Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Target Renstra sebesar 80 berhasil direalisasikan sebesar 99,91, dengan tingkat capaian terhadap Renstra mencapai 124,89%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam penerbitan Surat Rekomendasi dan SAJI di BPSPL



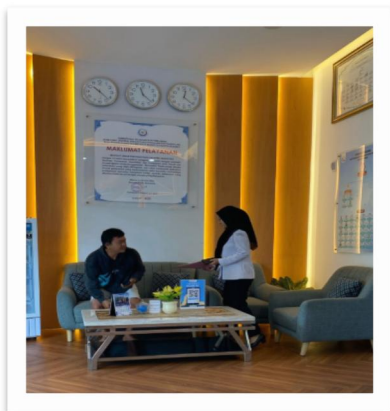
Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis ikan baik yang masuk Appendiks CITES dan dilindungi serta *look alike species* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* dan *offline* disesuaikan dengan standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.

E. Kegiatan pendukung

Selain pelayanan perizinan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi, IKU 3 juga didukung progress capaiannya melalui kegiatan-kegiatan lain diantaranya:

1. konsultasi perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk dalam daftar appendiks CITES.

Kegiatan konsultasi ini dilaksanakan baik secara offline (langsung) maupun secara *Online* melalui kontak layanan yang bisa diakses melalui whatsapp. Kegiatan konsultasi perizinan memberikan ruang bagi pelaku usaha pemanfaat jenis ikan/calon pelaku usaha untuk mengetahui berbagai hal tentang tata Kelola pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan /atau termasuk dalam daftar appendiks CITES serta bagaimana alur perizinan untuk pemanfaatan jenis ikan.



2. Verifikasi Permohonan Surat Pemanfaatan Jensi Ikan (SIPJI)

Surat Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) adalah syarat bagi pelaku usaha atau perusahaan untuk memanfaatkan jenis ikan yang dilindungi atau masuk dalam daftar Appendix II CITES. Persyaratan atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan SIPJI antara lain:

1. Surat Permohonan Penerbitan SIPJI,
2. NIB
3. KTP
4. NPWP
5. Format Proposal (Formulir) Permohonan SIPJI Perdagangan
6. Surat Pernyataan Kebenaran Data
7. Surat Permohonan Verifikasi Lapang

Prosedur permohonan :

1. Pengusaha mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
2. Pengusaha mengirimkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan melalui email erekombsplmksr@gmail.com
3. BPSPL Makassar akan mengirimkan petugas ke kantor dan gudang Pemohon untuk melakukan verifikasi lapangan



4. Hasil dari verifikasi lapang yaitu berupa dokumen BAP Verifikasi Lapang, yang nanti akan diserahkan kepada pemohon sebagai salah syarat dokumen di OSS
5. Pengusaha mengunggah seluruh dokumen ke sistem OSS



Selama tahun 2025 telah ada beberapa pelaku usaha yang berbasis di wilayah kerja BPSPL Makassar yang sudah mengajukan dan mendapatkan SIPJI. Total sebanyak **7 kali** dilakukan verifikasi lapangan SIPJI. Berikut adalah rekapitulasi Layanan verifikasi SIPJI di BPSPL Makassar selama tahun 2025.

No	Pelaku Usaha		Provinsi	Jenis SIPJI	Status
1	Pt.Talon Mandiri Jaya		Sulawesi Tengah	SIPJI DN Perdagangan Sidat yang dilindungi terbatas	Terbit
2	Pt.Hiu Delapan	Delapan	Sulawesi Selatan	SIPJI DN Perdagangan Hiu/Pari	Terbit
3	Pt.Hiu Delapan	Delapan	Sulawesi Selatan	SIPJI LN Perdagangan Hiu/Pari	Terbit
4	Alroza		Sulawesi Tenggara	SIPJI DN Perdagangan Hiu/Pari	Terbit
5	Sagara Bhakti Samudera Pt		Sulawesi Selatan	SIPJI DN Perdagangan Hiu/Pari	Terbit
6	Jansen Patric Barthel Posumah		Sulawesi Utara	SIPJI DN Perdagangan Hiu/Pari Napoleon	Terbit
7	Romi Sumendap		Sulawesi Utara	SIPJI DN Perdagangan Hiu/Pari Napoleon	Terbit

3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik, BPSPL Makassar menyediakan produk pelayanan berupa penerbitan Rekomendasi dan SAJI DN berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk menciptakan layanan yang lebih baik, responsif, dan sesuai dengan harapan pengguna jasa.

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022, setiap unit penyelenggara publik melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif terhadap kinerja pelayanan publik suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan nilai indeks pelayanan publik dan bahan penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan.pelayanan publik oleh Setdijen PRL pada Tanggal 23 Oktober 2025. Evaluasi dilakukan untuk seluruh produk layanan meliputi Penerbitan SAJI-DN dan Penerbitan Surat Rekomendasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan perhitungan data berdasarkan form F-01A (luring) oleh UPP, F-02A (luring) oleh evaluator dan F-03A (penilaian oleh *stakeholder*/pengguna jasa) sebagaimana diatur dalam Permen PANRB 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Terdapat 6 indikator aspek pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian meliputi kinerja pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Berikut Adalah Rincian Hasil Evaluasi Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Tahun 2024

No	Nama Pelayanan Publik	Nilai	Makna
1	Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri	4.940	A (Pelayanan Prima)
2	Penerbitan Surat Rekomendasi	4.952	A (Pelayanan Prima)
Total Nilai		4.946	A (Pelayanan Prima)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, UPP BPSPL Makassar memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar **4,946** dari skala 5,00 dengan **kategori A (Pelayanan Prima)** untuk dua jenis layanan, capaian ini meningkat disbanding tahun sebelumnya yakni di angka 4,862. Berikut rincian hasil evaluasi pelayanan publik BPSPL Makassar tahun 2025 untuk layanan SAJI DN

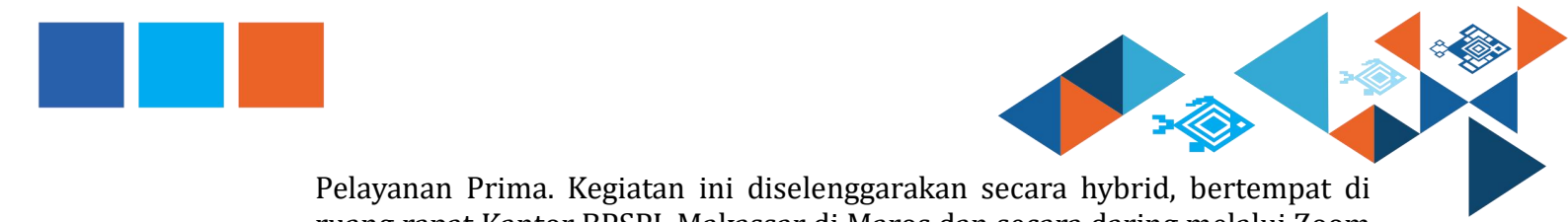
N o	Aspek	Nilai
1	Aspek 1: Kebijakan Pelayanan	1.147
2	Aspek 2: Profesionalisme SDM	1.188
3	Aspek 3: Sarana dan Prasarana	0.922
4	Aspek 4: Sistem Informasi Pelayanan Publik	0.659
5	Aspek 5: Konsultasi dan Pengaduan	0.620
6	Aspek 6: Inovasi	0.405
Total Nilai		4.940

Untuk Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi pemanfaatan jenis *look alike species*, hasil evaluasi layanan berdasar ke 6 aspek penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	Nilai
1	Aspek 1: Kebijakan Pelayanan	1.150
2	Aspek 2: Profesionalisme SDM	1.187
3	Aspek 3: Sarana dan Prasarana	0.923
4	Aspek 4: Sistem Informasi Pelayanan Publik	0.662
5	Aspek 5: Konsultasi dan Pengaduan	0.625
6	Aspek 6: Inovasi	0.405
Total Nilai		4.952

4. Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar secara rutin melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Reviu Standar Pelayanan Publik, di tahun 2025 kegiatan FKP dirangkaikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Budaya



Pelayanan Prima. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, bertempat di ruang rapat Kantor BPSPL Makassar di Maros dan secara daring melalui Zoom Cloud Meeting.

Forum Konsultasi Publik tahun 2025 dilaksanakan sebagai sarana penyampaian capaian kinerja pelayanan perizinan publik tahun 2024 hingga Triwulan I Tahun 2025, sekaligus sebagai wadah penjangkaran masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan publik, khususnya layanan penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dan surat rekomendasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Sulawesi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, serta pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dari berbagai daerah.

Bimbingan Teknis Budaya Pelayanan Prima difasilitasi oleh narasumber dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Maros. Materi yang disampaikan meliputi *Service Excellence*, *Great Communication*, dan *Handling Customer Complaint*, yang diakhiri dengan simulasi studi kasus pelayanan melalui metode *roleplay*.



F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan dalam penerbitan surat rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis *look alike* seperti soft coral dan anemone dilakukan secara online sehingga proses verifikasi permohonan dapat dilakukan secara cepat dan relatif aman karena pada jenis *look alike* tidak dibatasi dengan kuota pengambilan dari alam yang rawan disalah gunakan oleh pelaku usaha.



Untuk jenis yang masuk Appendiks CITES dan dilindungi, proses verifikasi dioptimalkan secara langsung (*offline*) khusus untuk daerah yang dapat dijangkau namun untuk di daerah *remote* dilakukan verifikasi melalui online sesuai dengan sop yang telah ditetapkan.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 3 pada Triwulan I Tahun 2026 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi. Namun di tahun 2026, kegiatan ini dialihkan di bawah UPT Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.

3.1.4 IKU 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar terdiri dari Pelayanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN) dan Penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Look Alike Species (SR).

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh dari penjumlahan nilai indikator dari 4 aspek penilaian yang terdiri dari (SIPJI (Verifikasi lapangan), SAJI-DN, SKM dan penerapan konvensi). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum (\text{bobot aspek} \times \sum A) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum B) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum C) + \sum (\text{bobot aspek} \times \sum D)$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Penerapan Konvensi

Penjelasan Komponen Perhitungan:

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Nilai indikator		
				50	75	100
Proses Verifikasi lapangan untuk Penerbitan SIPJI	40%	Dashboard SIPJI	10%	Terdapat informasi jenis SIPJI dan jenis ikan	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, dan provinsi	Terdapat informasi jenis SIPJI, jenis ikan, provinsi, dan nama pelaku usaha
		SDM	30%	Ketelitian rendah	ketelitian sedang	Ketelitian tinggi
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		Berita Acara	10%	Koreksian > 50%	Koreksian >50%≤75%	Tidak ada koreksian
		kesesuaian baku waktu pelayanan	20%	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	20%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
Proses Penerbitan SAJI-DN	40%	Dashboard SAJI	10%	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap
		Rekap Penerbitan	10%	Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap
		Dokumen diarsipkan	10%	Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap
		kesesuaian baku waktu pelayanan	40%	Melebihi baku waktu		Sesuai baku waktu
		Penanganan Pengaduan	10%	Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam
		Jumlah permohonan yang diproses	10%	< 50%	> 50%	100%
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	Tidak dilaksanakan	Dilaksanakan sebagian	Dilaksanakan seluruhnya
		Nilai SKM	30%	<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7
Penerapan Konvensi	10%	Penerapan Konvensi	100%	Belum Diterapkan	Masih dalam proses penerapan	Telah diterapkan

Capaian IKU 4 pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

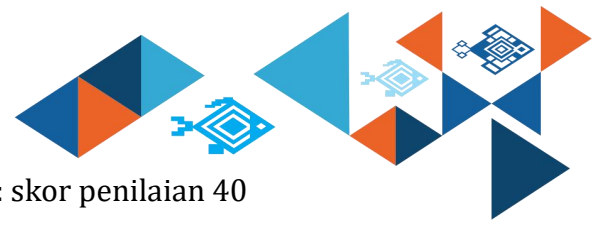
Tabel 10. Capaian IKU Realisasi IKU 4

SS -4	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IK - 4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
-	80	99,91	124,89 (120 kinerjaku)	-	80	124,89

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian IKU ini Adalah 99,91 atau 124,89% dari target 80. Nilai yang diperoleh berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari:

1) Aspek proses penerbitan Surat Rekomendasi (Bobot aspek 40%) : skor penilaian 40



- 2) Aspek proses penerbitan SAJI DN (Bobot aspek 40%) : skor penilaian 40
- 3) Aspek Survey Kepuasan Masyarakat (Bobot aspek 10%) : skor penilaian 9,915
- 4) Aspek inovasi dan konvensi (Bobot aspek 10%) : skor penilaian 10

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena IKU ini merupakan IKU baru dan tidak ada di tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Berdasarkan perbandingan dengan target Renstra 2025–2029, capaian IK-4 Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Target Renstra sebesar 80 berhasil direalisasikan sebesar 99,91, dengan tingkat capaian terhadap Renstra mencapai 124,89%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar, yang melebihi target yang telah ditetapkan, didukung oleh konsistensi pelaksanaan pelayanan perizinan penerbitan SAJI DN dan Surat Rekomendasi yang berjalan sesuai standar pelayanan dan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan alur layanan, transparansi informasi, serta ketepatan waktu penyelesaian menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan.

Capaian IKU tersebut juga diperkuat melalui pelaksanaan layanan konsultasi perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau termasuk dalam daftar Appendix CITES, baik secara luring maupun daring. Kegiatan konsultasi ini memberikan ruang bagi pelaku usaha dan calon pengguna layanan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola pemanfaatan jenis ikan serta alur perizinan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi kesalahan administrasi dan memperlancar proses pelayanan perizinan.

Selain itu, komitmen BPSPL Makassar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik diwujudkan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik, Forum Konsultasi Publik (FKP), serta penguatan budaya pelayanan prima. Evaluasi dan forum partisipatif tersebut menjadi sarana perbaikan berkelanjutan berbasis masukan pemangku kepentingan, yang mendorong pelayanan semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan capaian IKU.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 4 yang dilaksanakan pada selama tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Reviu Standar Pelayanan)

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertujuan untuk menghimpun masukan terkait Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi dan SAJI DN di lingkungan BPSPL Makassar.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2025 bertempat di Kantor BPSPL Makassar. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh BPSPL Makassar dengan mengundang peserta dari





lingkup pengguna layanan (pelaku usaha perikanan), instansi pemerintah terkait, akademisi, media massa dan organisasi/tokoh masyarakat.

Dalam kegiatan FKP dilaklkan reviu ada seluruh komponen yang ada dalam standar pelayanan. Mekanisme evaluasi yang dilakukan adalah dengan memberikan masukan dan saran pada masing-masing komponen yang ada. da dua komponen utama dalam standar pelayanan yaitu service delivery dan manufacturing. Untuk komponen service delivery terdiri atas 6 unsur, sementara dalam komponen manufacturing terdiri atas 8 unsur. Secara keseluruhan terdapat 14 unsur dalam standar pelayanan yang dilakukan evaluasi meliputi:

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
7. Dasar hukum
8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14. Evaluasi kinerja pelaksana

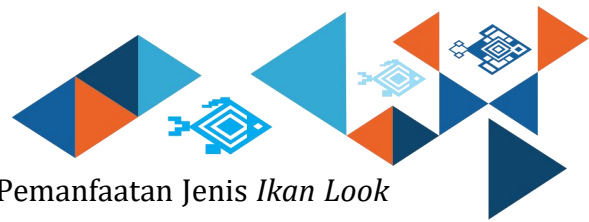
Selain dilakukan dreviu terhadap standar pelayanan, dalam kegiatan FKP juga dibahas saran-saran dalam survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Saran-saran dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dibahas dalam pelaksanaan FKP Tahun 2024 ialah terkait dengan beberapa hal meliputi:

- a) Dilakukan penyesuaian dasar hukum terkait regulasi harga patokan ikan terbaru yang mengacu pada Kepmen-KP Nomor 89 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b) Dilakukan pendetailan mekanisme dan prosedur pada tahapan permohonan SAJI DN berdasarkan pada tahapan yang dilakukan pada aplikasi e-SAJI.

Kegiatan FKP ditutup dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan penyusunan standar pelayanan publik penerbitan rekomendasi dan SAJI DN di lingkungan BPSPL Makassar oleh perwakilan dari masing-masing pihak. Beberapa poin yang disampaikan dalam Berita Acara meliputi identifikasi masalah yang meliputi:

- a) Penyesuaian dasar hukum terkait dengan Harga Patokan Ikan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b) Perincian mekanisme dan prosedur pada tahapan permohonan SAJI DN berdasarkan pada tahapan yang dilakukan pada aplikasi e-SAJI.

Penyesuain – penyesuaian tersebut kemudian dituangkan dalam Standar



Pelayanan Penerbitan SAJI DN dan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis *Ikan Look Alike Specie* yang baru.

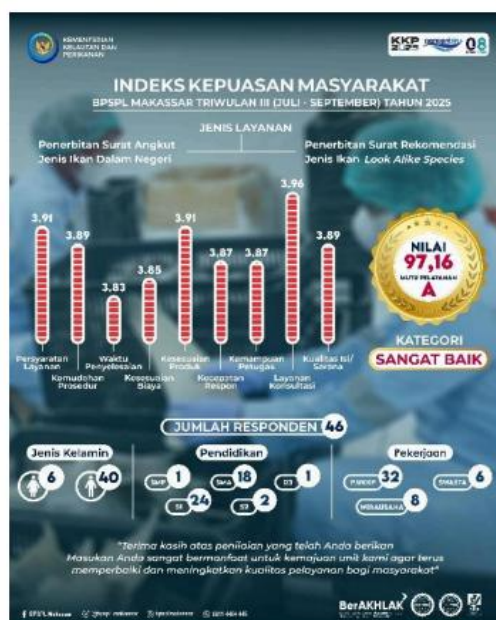
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai alat ukur bagi BPSPL Makassar dalam menilai penyelenggaraan pelayanan perizinan, khususnya terkait efektivitas penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur, konsistensi terhadap ketentuan yang berlaku, serta komitmen aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Melalui survei ini, diharapkan dapat diketahui secara dini tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan kondisi yang diharapkan.

SKM bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan BPSPL Makassar serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap triwulan dan bersifat komprehensif. Hasil analisis survei dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat, merumuskan kebijakan peningkatan pelayanan perizinan, serta melihat kecenderungan (tren) kualitas layanan dan kinerja penyelenggara pelayanan. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner elektronik melalui Aplikasi SI SUSAN, yang disebarkan kepada pemohon perizinan melalui media sosial dan/atau QR Code setelah dokumen perizinan diterbitkan. Kuesioner memuat pertanyaan terbuka dan tertutup yang mewakili unsur-unsur pelayanan sebagai indikator kualitas layanan.

Indikator penilaian SKM mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan karakteristik layanan di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, meliputi sembilan unsur pelayanan, yaitu persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, respon aplikasi, kemudahan fitur aplikasi, isi/konten aplikasi, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Pelaksanaan survei dilakukan pada setiap hari kerja dan/atau setiap permohonan yang ditindaklanjuti dengan proses verifikasi, dengan periode survei triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2025. Hasil pelaksanaan SKM Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada gambar berikut.



F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025 kegiatan pelayanan penerbitan SAJI DN dan Penerbitan Surat Rekomendasi yang mendukung progress capaian IKU 4 dioptimalkan pelaksanaannya dengan menggunakan satu aplikasi yakni e-SAJI yang dapat diakses oleh pengguna jasa di berbagai daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar. Dengan adanya penerapan SOP yang mengatur verifikasi dilaksanakan di kantor ataupun melalui kunjungan langsung ke Gudang pelaku usaha dan/atau secara online, memungkinkan pelayanan berjalan secara efektif dan dapat menjangkau seluruh pengguna jas. Adapun kegiatan yang mendukung pelayanan seperti review standar pelayanan ataupun bimtek pelayanan prima yang mendukung kualitas SDM dilakukan secara *hybrid* (*offline* maupun *online*).

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2026 adalah pelaksanaan Pelayanan penerbitan SAJI DN

dan Surat Rekomendasi, dan Survey Kepuasan Masyarakat TW I. Namun di tahun 2026, kegiatan ini dialihkan di bawah UPT Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar.

3.1.5 IKU 5 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU 5 pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian IKU Realisasi IKU 5

SS -5	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IK - 5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
3	2	2	100	-1	-	-

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian indikator kinerja utama “Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar” tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5 diatas, dimana dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian IKU ini Adalah 2 (dua) dokumen dari target 2 (dua) dokumen atau capaiannya adalah 100%, dua dokumen capaian tersebut adalah Dokumen verifikasi pemanfaatan runag laut dan Dokumen Pengendalian pemanfaatan ruang laut.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen) apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sama-sama mencapai 100% secara persentase, namun secara nilai capaian mengalami penurunan dimana capaian tahun 2025 itu 2 (dua) Dokumen sedangkan capaian tahun 2024 itu 3 (tiga) Dokumen.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan

dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2025 walaupun mengalami penurunan secara nilai apa bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 hal tersebut tidak bisa disebut kegagalan karena secara capaian tetap 100% karena capaiannya sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan yaitu 2 (dua) dokumen, adapun penurunan nilai capaian tersebut juga dikarenakan ada perbedaan dalam perhitungan di manual IKU, dimana di tahun 2024 itu Sosialisasi menjadi target sedangkan di tahun 2025 sosialisasi tidak menjadi target kinerja, sehingga targetnya hanya dua dokumen aja di tahun 2025 yaitu verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan capaian kinerja IKU ini meliputi:

a) Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan verifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, Verifikasi administrasi, Penilaian Teknis, serta Verifikasi Lapangan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan Verifikasi pemanfaatan ruang laut dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu menjadi tim penilai teknis yang dilaksanakan di Direktorat PRKPD L dan pelaksanaan penilaian teknis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui penugasan oleh pusat.



Penilaian Teknis yang telah dilakukan selama tahun 2025 adalah 255 permohonan, yang dilakukan Direktorat PRKPD L 204 permohonan dan yang dilakukan oleh BPSPL Makassar 51 Permohonan. Jenis Pemanfaatan ruang laut yang dilakukan selama tahun 2025 adalah *Breakwater*, Dermaga, Fasilitas Penunjang Budi Daya, Pelabuhan, Reklamasi, Terminal Khusus, Terminal Umum, Kabel dan Pipa Bawah Laut, Wisata Bahari, Galangan Kapal, KJA, Budi Daya Karang Hias, Budi Daya Kerang Mutiara, *Dumping*, Fasilitas Umum seperti Jalan Raya dan Ruang Terbuka, Kegiatan Perikanan,



Restoran, serta Permukiman Masyarakat Lokal. Dengan jumlah pemanfaatan terbesar adalah Terminal Khusus.

Mekanisme penugasan dari pusat diatur berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;

Jumlah capaian PNPB atas penilaian teknis yang dilakukan oleh UPT sepanjang tahun 2025 sebesar Rp. 232.566.000, dengan kegiatan yang mendominasi adalah Fasilitas Penunjang Budi Daya yang menyumbang 45% dari total capaian PNPB atas penilaian teknis UPT;

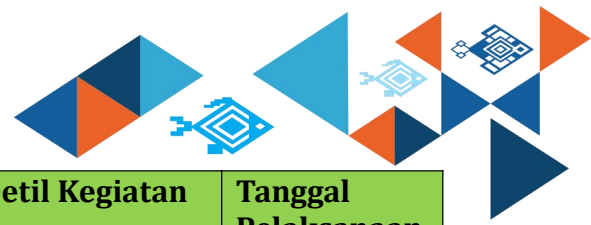
Database informasi terkait identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/kkprlbpsplmakassar>;

Hasil inovasi BPSPL Makassar dengan munculnya Platform bernama “Layar Pinisi” yang merupakan akronim dari Layanan Arahan dan Penyediaan Informasi Pemanfaatan Ruang Laut Berbasis WebGIS berisi peta tematik terkait informasi zonasi perairan di Sulawesi yang digambarkan dalam sebuah platform online mapping melalui ArcGIS online

b) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Penilaian Pelaksanaan PKKPR/L/KKRL telah dilaksanakan di 12 subyek hukum wilayah kerja BPSPL Makassar antara lain :

No	Subjek Hukum	Jenis Dokumen Permohonan	Provinsi	Detil Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	PT Pertamina Patra Niaga	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Pengembangan Terminal Khusus	23 Juli 2025
2	PT Virtue Dragon Nickel Industrial Park	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Kawasan Industri (Pengembangan Pelabuhan)	24 Juli 2025
3	PT Kendari Kawasan Industri Terpadu	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Pembangunan TUKS	23 Juli 2025
4	PT DSSP Power Kendari	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Pengembangan Terminal Khusus	24 Juli 2025
5	PT Dok Samudra Inti Perkasa	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung (Detil Kegiatan: Pembangunan Terminal Khusus)	23 Juli 2025
6	PT Dokmor Optima Kajayan	PKKPRL	Sulawesi Tenggara	Pembangunan Area Tambat/Labuh Kapal	24 Juli 2025



No	Subjek Hukum	Jenis Dokumen Permohonan	Provinsi	Detil Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
7	PT Baoshuo Taman Industry Investment Group	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembangunan Terminal Khusus	23 September 2025
8	PT Mahkota Semesta Nikelindo	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembangunan Terminal Khusus	24 September 2025
9	PT Vale Indonesia	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembangunan Terminal Khusus	25 September 2025
10	PT. Bintang Delapan Mineral	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembangunan Pelabuhan	24 September 2025
11	PT. Qarim Jaya	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembukaan Lahan, Areal Sandar Kapal	25 September 2025
12	PT. Bukit Indah Limonit	PKKPRL	Sulawesi Tengah	Pembangunan Terminal Khusus	26 September 2025

Berdasarkan hasil analisis, total hasil penilaian PKKPRL/KKRL dari Subyek Hukum Berusaha dan Non Berusaha di wilayah BPSPL Makassar pada tahun Anggaran 2025 terdapat 8,0% (1 subyek hukum) yang masuk dalam kategori tidak taat , 58,0% subyek hukum masuk dalam kategori Taat dengan Catatan dan 33,0% Subyek hukum masuk dalam kategori Taat dari Total sampel penilaian PKKPRL sebanyak 12 Sampel Subyek Hukum.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU 5 yang dilaksanakan pada Tahun 2025 diantaranya adalah konsultasi perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 baik di kantor BPSPL Makassar di Maros maupun di tiap wilker BPSPL Makassar, selain itu dilaksanakan juga sosialisasi dan Coaching clinic perizinan pemanfaatan ruang laut yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 19 November 2025 dengan jumlah peserta 94 orang dan Narasumber 4 orang.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya, ditandai oleh pemanfaatan Sumberdaya Manusia secara optimal, integrasi kegiatan yang menghemat waktu dan biaya serta penggunaan data dan informasi yang sudah tersedia.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU 5 pada Triwulan I Tahun 2026 adalah pelaksanaan kegiatan penilaian teknis dan kegiatan pengendalian KKPRL.

3.1.6 IKU 6 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Teknik menghitung capaian IKU ini adalah Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Tabel 12. Capaian Realisasi IKU 5

SS -6	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar					
IK - 6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
-	1	1	100	-	-	-

A. Capaian IKU 5 Tahun 2025

Capaian inidkator kinerja Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen) tahun 2025 adalah 1 (satu) dokumen dari target 1 (satu) dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang sama di tahun 2024 karena di tahun 2025 tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada target kinerja BPSPL Makassar.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Solusi

BPSPL Makassar pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan untuk indikator kinerja “Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)” dimana BPSPL Makassar berhasil mengidentifikasi pemanfaatan beberapa pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja, adapun kegiatan identifikasi tersebut meliputi :

1. Sulawesi Selatan

Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota yaitu di Kabupaten Bulukumba pada 2 pelaku usaha, Kabupaten Kepulauan Selayar 10 pelaku usaha, Kota Makassar 20 Pelaku

Usaha, Kabupaten Pangkep 8 pelaku usaha dan Kabupaten Barru 1 pelaku usaha dengan total ada 40 pelaku usaha. Adapun bidang usahanya meliputi Pariwisata (resort/hotel) 31, Industri Pertanian 1, Restoran 1, Pembangkit Listrik 2, Budidaya Perikanan 1, Industri Kapal 2, Perdagangan BBM 1 dan Jasa Telekomunikasi 1, dengan perkiraan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp.532.485.000.

2. Sulawesi Utara

Kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Sulawesi Utara dilaksanakan di dua Kabupaten/Kota yaitu di Kota Bitung dengan jumlah pelaku usaha 11 dan di Kabupaten Minahasa Utara dengan pelaku usaha 5, jadi total pelaku usaha di Sulawesi Utara yang berhasil diidentifikasi adalah 16 pelaku usaha dengan jenis bidang usaha semuanya pariwisata (resort/hotel), dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 454.141.000.



3. Sulawesi Tengah

Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tengah hanya dilakukan di satu Kabupaten yaitu di Kabupaten Tojounauna dengan jumlah pelaku usaha yang berhasil diidentifikasi adalah 16 pelaku usaha dengan bidang usaha pariwisata (resort/hotel), dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp. 162.887.510.

4. Sulawesi Gorontalo

Kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di satu Kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dengan jumlah pelaku usaha 3 dengan jenis bidang usaha semuanya pariwisata (resort/hotel).

5. Sulawesi Tenggara

Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara hanya dilakukan di satu Kabupaten yaitu di Kabupaten Wakatobi dengan jumlah pelaku usaha yang berhasil diidentifikasi adalah 15 pelaku usaha dengan bidang usaha pariwisata (resort/hotel) 13 dan bidang Karoke dan resto 2 Pelaku Usaha, dengan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp. 219.301.925.

E. Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang dilaksanakan dalam untuk mendukung terlaksananya kegiatan Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil adalah koordinasi dengan Direktorat pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan untuk menyamakan persepsi



terkait output kegiatan yang diharapkan dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi anggaran dan sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pembagian tugas tiap personil yang ikut dalam kegiatan sehingga meminimalkan personil terlalu banyak dalam pelaksanaan tersebut yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 adalah persiapan pelaksanaan kegiatan Identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil berupa persiapan dokumen yang dibutuhkan dan koordinasi.

3.1.7 IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

1. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL.
2. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 13. Capaian IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
88,6	70	92	131,43%	3,4	70	131,43%

A. Capaian IK Tahun 2025

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar frekuensi pengukurannya dilakukan secara tahunan dengan realisasi pada Tahun 2025 sebesar **92** dengan predikat **“AA (Sangat Memuaskan)”** atau 131,43% dari target sebesar 70 dengan nilai maksimum 100. Hasil tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.3743/DJPK.1/RC.610/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada BPSPL Makassar. Capaian tersebut merupakan akumulasi dari pelaksanaan dan pemenuhan seluruh tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama Tahun Anggaran 2025, yang meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi

akuntabilitas kinerja internal, yang secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan kualitas sangat baik dan konsisten.

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	27.60
2	Pengukuran Kinerja	30	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15	13.80
4	Evaluasi Internal	25	23.00
Nilai Hasil Evaluasi		100	92
Predikat Penilaian			AA

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, Nilai AKIP BPSPL Makassar pada Tahun 2025 mencapai 92 dengan predikat “AA (Sangat Memuaskan)”, sedangkan Nilai AKIP Tahun 2024 sebesar 88,6 “A (Memuaskan)”. Dengan demikian, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 3,4 poin pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Berdasarkan perbandingan dengan target Renstra 2025–2029, capaian IK-7 Nilai PM SAKIP Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan predikat “AA (Sangat Memuaskan)” dan melampaui target yang ditetapkan. Dengan target sebesar 70, realisasi Tahun 2025 mencapai 92 atau sebesar 131,43% terhadap target.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa BPSPL Makassar berhasil memenuhi sebagian besar dokumen dan proses yang dipersyaratkan dalam Penilaian Mandiri SAKIP. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui tersedianya dan dimanfaatkannya secara optimal Dokumen Perencanaan Kinerja, Dokumen Pengukuran Kinerja, Dokumen Pelaporan Kinerja, serta Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.



Kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSPL Makassar salah satunya adalah menghadiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan pada tanggal 27–28 Oktober 2025 bertempat di Bigland Hotel Bogor, Jawa Barat.



BPSPL Makassar Juga Menghadiri Pleno Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 lingkup DJPK pada Senin – Rabu, 1 – 3 Desember 2025 bertempat di Tamarin Hotel Jakarta Jl. K.H. Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Satker lingkup DJPK baik Pusat Maupun UPT. Adapun tantangan yang masih perlu diperbaiki adalah penyesuaian dokumen perjanjian kinerja sebagai

dampak perubahan anggaran PNBK pada Tahun 2025. Solusi yang dilakukan dan



direkomendasikan adalah penyempurnaan serta penyesuaian dokumen kinerja agar tetap selaras dengan dinamika anggaran dan target kinerja organisasi, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan akhir Tahun 2025, kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP antara lain:

1. Pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi rencana aksi Tahun 2025;
2. Verifikasi capaian kinerja Tahun 2025 sebagai bagian dari pengendalian internal;
3. Finalisasi dokumen kinerja lingkup DJPKRL Tahun 2025;
4. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) BPSPL Makassar Tahun 2025 sebagai forum evaluasi dan penguatan kinerja;
5. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagian besar kegiatan koordinasi, evaluasi, dan pemenuhan dokumen SAKIP dilakukan secara daring (online), sehingga tidak memerlukan dukungan anggaran tambahan. Dengan demikian, anggaran yang digunakan secara khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini cukup minim, tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.

G. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan 1 2026 antara lain melengkapi dokumen pendukung rekomendasi hasil penilaian mandiri SAKIP.

3.1.8 IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$



1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu Triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu Triwulan (tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = t-1 \times RRev_{nn}$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 15%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) bulanan
- Nilai RPD dikunci setiap awal Triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap Triwulan khusus Triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = |R BPeg_n - RPD BPeg_n| / RPD BPeg_n \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = |R BBar_n - RPD BBar_n| / RPD BBar_n \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = |R BMod_n - RPD BMod_n| / RPD BMod_n \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA_n = (|DevDIPA BPeg + DevDIPA BBar + DevDIPA BMod|) / 3$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan
- Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap Triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap Triwulan
- Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
- Target Penyerapan masing-masing belanja

Target Triwulan dihitung dengan

$$[TA]_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$[TPBelPeg]_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke -n$$

$$[TPBelBar]_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke -n$$

$$[TPBelMod]_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke -n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$[NKPA]_n = ((PA_n) / (TP_n)) \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%





- a) Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
 - b) Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
 - c) Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
 - d) Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan IV mendapat poin 100, Triwulan IV 90, Triwulan IV 80, Triwulan IV 70.
$$KPA\ BK = NK - Kw * 40\% + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$
5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
- a) Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai
 - b) 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual
 - c) Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik
$$RKPT = SPM\ LS\ TW / SPM\ LS * 100$$
6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
- a) Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
 - b) Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
 - a. Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggung jawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.
$$NK - UPKW = i = 1n \times KWUPnGUP + nPTUP$$
 - c) Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.
 - d) $\%GUP\ disebulankan = \%GUP \times (jml\ hari\ sebulan) / \Delta t\ GUP$
$$NK - PGUP = i = 1n \times PGUPnGUP$$
 - e) Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran
$$NKSetor = 100 - Setoran\ TUP / TUP \times 100$$
 - f) Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP
$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$
7. Dispensasi Penyampaian SPM – (Pengurang Nilai IKPA)
- a) Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu

yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada Triwulan IV,

- b) Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- c) Rasio Dispensasi (permil)
 $RDSPM = \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV} \times 1000}$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- a) Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- b) Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya
 $NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{(i=1)}^n \text{ROKW}}{n}$
- c) Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO Triwulan IV sampai dengan Triwulan IV berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target Triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- d) RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi
 $NK - CRO = \left(\frac{\sum_{(i=1)}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) / n$
- e) Nilai Indikator Capaian Output
 $IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$

Tabel 14 Capaian IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
99,79	89	89,73	100,82%	-10,06	89	100,82%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Makassar pada Tahun 2025 sebesar 89,73 atau 100,82% dari target tahun 2025 sebesar 89.



Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nomor: 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 dan pada Aplikasi OmSpan (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, Secara umum, pengelolaan anggaran tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,79. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 sebesar 89,73, terjadi penurunan sebesar 10,06 poin. Penurunan capaian ini dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan anggaran pada Tahun 2025, termasuk adanya penyesuaian kebijakan dan perubahan alokasi anggaran di tengah tahun berjalan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Oceans for Prosperity Project - LAUTRA yang berdampak pada kualitas pelaksanaan beberapa indikator Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada penilaian IKPA.

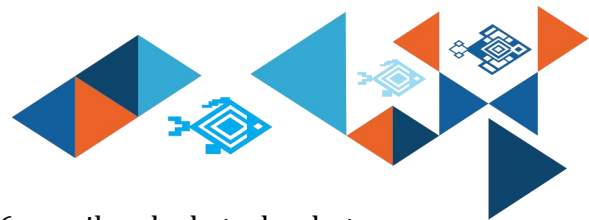
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 89,73 telah melampaui target tahunan sebesar 89, dengan tingkat capaian sebesar 100,82%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 yang juga ditetapkan sebesar 89, maka capaian terhadap Renstra mencapai 100,82%, sehingga target tahun pertama Renstra berhasil dipenuhi.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan Tahun 2025 adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. pencapaian IKPA Tahun 2025 tetap ditunjukkan melalui terjaganya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara serta terlaksananya sebagian besar kegiatan sesuai rencana. Adapun faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian antara lain adanya penyesuaian kebijakan dan perubahan alokasi anggaran di tengah tahun berjalan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Oceans for Prosperity Project - LAUTRA yang berdampak pada hasil penilaian IKPA. Adapun Analisa penilaian IKPA Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indikator Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai aspek 91.59
 - a. Revisi DIPA dengan nilai 100, hal ini menunjukkan stabilitas rencana kegiatan dan telah melakukan revisi sesuai ketentuan.
 - b. Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 83.18, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana bulanan yang disusun di awal dengan realisasi aktual di lapangan.
2. Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran nilai aspek sebesar 89.14
 - a. Penyerapan Anggaran dengan nilai 65.99, Nilai ini sangat rendah dibandingkan indikator lainnya. Ini mengindikasikan bahwa hingga akhir tahun, penyerapan anggaran tidak berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan dan terdapat kendala dalam eksekusi kegiatan. Kendala utama pada realisasi dan penyerapan kegiatan Oceans for Prosperity Project - LAUTRA dimana pada akhir tahun realisasi sebesar 36,55% dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan dan perubahan alokasi anggaran di tengah tahun berjalan.
 - b. Belanja Kontraktual dengan nilai 93.33 masih ada keterlambatan dalam penyelesaian kontrak pada kegiatan lautra



- c. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100
 - d. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 97.26 masih ada keterlambatan dalam pengelolaan UP dan TUP
3. Indikator Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran nilai Aspek sebesar 100 Meskipun indikator penyerapan anggaran rendah (65.99), namun seluruh target output fisik BPSPL Makassar telah tercapai 100%.
- Sebagai solusi, dilakukan penguatan perencanaan sejak awal tahun, percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini meliputi :

- Melakukan Revisi DIPA dan Halaman 3 DIPA tepat waktu
- Mendapatkan dan melakukan pembayaran belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan UP dan TUP dengan baik
- Pengisian capaian output tepat waktu
- Penyerapan anggaran sesuai target
- Melakukan Monitoring capaian IKPA secara berkala.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Oprator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I 2026 antara lain melaksanakan koordinasi yang baik secara konsisten antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan untuk dapat memaksimalkan capaian 8 indikator kinerja tersebut.

3.1.9 IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
----------	--------	-------

		(%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{Penggunaan_{SBK}} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
CRO	: Capaian RO Penggunaan SBK
Penggunaan SBK	: Penggunaan SBK
NEAlokasi	: Nilai Efektivitas Alokasi
WCRO	: Bobot Capaian RO
Wpenggunaan SBK	: Bobot Penggunaan SBK
WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi

Tabel 15 Capaian IK 9 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
100	71,5	100	139,86%	0	81,5	122,70%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar 100 (Nilai) atau 139,86% dari target sebesar 71,5. Capaian Kinerja ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor: 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar sebesar 100. Pada Tahun 2025, realisasi indikator tetap dengan nilai 100, sehingga tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian dibandingkan Tahun 2024. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa BPSPL Makassar mampu mempertahankan kinerja pelaksanaan anggaran pada level optimal.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 71,5 dengan tingkat capaian sebesar 139,86%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 yang ditetapkan lebih besar yaitu 81,5, maka capaian terhadap Renstra mencapai 122,70%, sehingga target tahun pertama Renstra berhasil dipenuhi.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Progres capaian sampai dengan tahun 2025 adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan dan keuangan selaku operator capaian output. Hal ini dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai pada Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung yang berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 antara lain:

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin;
- 2) Rekonsiliasi keuangan dan kinerja secara periodik;
- 3) Penguatan koordinasi antara perencana, PPK, dan pengelola keuangan;
- 4) Pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi realisasi anggaran dan output.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan capaian output dan perencanaan dalam penyusunan SBK pada penyusunan perencanaan anggaran. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan I 2026 antara lain melaksanakan koordinasi yang baik secara konsisten antara bagian program perencanaan, keuangan, dan Penguatan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala serta peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan SBK.

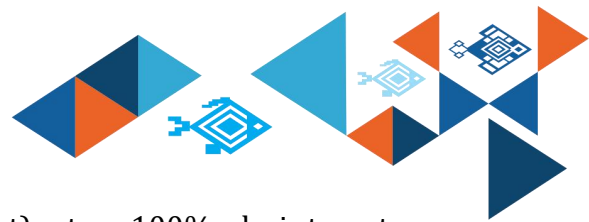
3.1.10 IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Laporan SPIP Triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan IV Tahun 2025.

Tabel 16 Capaian IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
4	4	4	100,00%	0	-	-



A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini adalah 4 (Empat) atau 100% dari target sebanyak 4 (Empat) Laporan. Realisasi capaian anatra lain laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 dan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 dan Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025 yang telah disusun dan dilaporankan ke sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Pada Tahun 2024, realisasi penyusunan Laporan SPIP sebanyak 4 dokumen. Pada Tahun 2025, realisasi indikator ini sama sebesar 4 dokumen, sehingga tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian dibandingkan Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan konsistensi BPSPL Makassar dalam memenuhi kewajiban penyusunan dokumen SPIP.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian tahun 2025 adalah didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat antara lain Tim Keuangan, Tim Kepegawaian, tim perencanaan dan tim pelaksanaan teknis kegiatan dalam proses penyusunan dan pelaporan SPIP. Tidak terdapat kendala signifikan dalam pencapaian indikator ini. Untuk menjaga kualitas dokumen SPIP, langkah perbaikan yang terus dilakukan adalah peningkatan pemahaman terhadap kebijakan SPIP serta penguatan pengendalian internal melalui evaluasi berkala.

E. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator kinerja ini adalah antara lain:

- 1) Penyusunan dan pengusulan TIM SPIP tahun 2025
- 2) Penyusunan dan pengumpulan dokumen SPIP dari seluruh unit kerja;
- 3) Koordinasi dan verifikasi kelengkapan dokumen SPIP;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan penerapan SPIP secara berkala;
- 5) Pelaporan hasil pelaksanaan SPIP kepada pimpinan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain penyusunan laporan SPIP Triwulan I dengan melakukan koordinasi yang baik setiap tim dan penanggung jawab kegiatan, Penetapan kembali Tim SPIP Tahun 2026 dan Penyusunan Penetapan Risiko.

3.1.11 IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas



tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

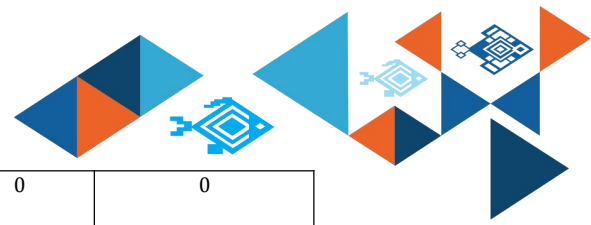
Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

a) Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA A / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

b) Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	Diklat Struktural			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	Diklat Fungsional			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
III	Diklat 20 JP Tahun berjalan			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	Seminar 2 Tahun Terakhir			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5



	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional

b. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

c. Disiplin bobot nilai 5

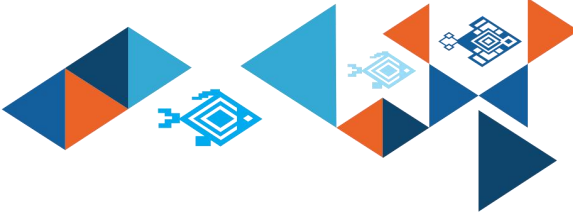
No	Nama Hukuman Disiplin *****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

d. Capaian dan Indeks Profesionalitas ASN

No	Kategori	Nilai
1	Sangat Tinggi	91-100
2	Tinggi	81-90
3	Sedang	71-80
4	Rendah	61-70
5	Sangat Rendah	0-60

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019



$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

$W_{1j} * R_{1j}$ IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{2k} * R_{2k}$

$W_{3l} * R_{3l}$

$W_{4m} * R_{4m}$

Tabel 17 Capaian IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
90,78	80	89,82	112,28%	-0,96	80	112,28%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capain Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar mencapai 89,82, dari target sebesar 80 dengan presentase capaian 112,28%. Capaian ini sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor: B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkupDirektorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Capaian ini juga melebihi target yang terdapat di renstra.

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar pada Tahun



2025 sebesar 89,82 mengalami penurunan tipis sebesar 0,96 dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 90,78. Meskipun demikian, capaian Tahun 2025 tetap melebihi target Renstra DJPKRL sebesar 80, dengan tingkat pencapaian 112,28% terhadap Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja profesionalitas ASN masih berada di atas standar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tetap mendukung pencapaian sasaran strategis BPSPL Makassar.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 89,82 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 80 dengan tingkat capaian sebesar 112,28%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 yang juga ditetapkan sama yaitu 80, maka capaian terhadap Renstra juga mencapai 112,28%, sehingga target tahun pertama Renstra berhasil dipenuhi.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar didukung oleh pengelolaan SDM yang konsisten, khususnya melalui keterbukaan informasi mengenai peluang pelatihan dan pengembangan kompetensi yang disampaikan secara merata kepada seluruh pegawai BPSPL Makassar. Selain itu, peran aktif pimpinan yang mendorong ASN untuk mengikuti seluruh peluang peningkatan kompetensi sesuai kriteria yang ditetapkan turut memperkuat budaya profesionalitas ASN. Adapun penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh mutasi pegawai lingkup BPSPL Makassar baik mutasi keluar maupun mutasi masuk. Sebagai solusi, dilakukan penguatan koordinasi, dan peningkatan monitoring partisipasi dan pemenuhan unsur profesionalitas ASN secara berkala. Adapun beberapa bimbingan teknis/peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh BPSPL Makassar antara lain:

1. Sertifikasi Pengelolaan Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan
2. Sertifikasi Pengawasan Mahir Kawasan Konservasi Perairan
3. Sertifikasi Drone Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Petugas Pemanfaatan Ruang Laut antara lain bimbingan teknis dan Sertifikasi Drone serta Sertifikasi selam.

E. Kegiatan pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan berbagai kegiatan, antara lain peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitasi pemenuhan unsur pengembangan profesional berkelanjutan, pembinaan kinerja dan disiplin ASN, serta pengelolaan administrasi kepegawaian yang akuntabel dan berbasis data..

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2025 menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien dan optimal, karena target indikator berhasil dicapai tanpa memerlukan anggaran yang khusus dan signifikan.

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain penyampaian informasi pelatihan atau bimbingan teknis serta seminar kepada pegawai BPSPL Makassar, pemutakhiran data profesionalitas ASN, peningkatan partisipasi ASN dalam kegiatan pengembangan kompetensi, serta penguatan monitoring capaian individu ASN.

3.1.12 IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara



tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
2. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 18 Capaian IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
100	95	100	105,26%	0	80	125,00%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar mencapai 100% atau 105,26% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. Capaian ini sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Capaian nomor: B.233/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2025 perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan IV Tahun 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar pada Tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan tidak adanya penurunan maupun kenaikan atau hasil maksimal dengan capaian Tahun 2024 yang juga mencapai 100%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 95 dengan tingkat capaian sebesar 105,26%. Capaian Tahun 2025 tersebut melampaui target Renstra DJPK sebesar 80, dengan tingkat pencapaian 125,00% terhadap Renstra.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Berdasarkan Lampiran Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.233/DJPK.1/TU.210/I/2026, pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2025, BPSPL Makassar tercatat memiliki 1 (satu) rekomendasi hasil pengawasan, dengan 1 (satu) rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas (100%) dan 0 (nol)



rekomendasi tersisa. Dengan capaian tersebut, BPSPL Makassar memperoleh nilai capaian IKU sebesar 100%, yang menunjukkan pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan secara optimal untuk perbaikan kinerja. Capaian ini juga berada di atas rata-rata capaian IKU lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebesar 85,77%. Secara menyeluruh tahun 2025 BPSPL Juga melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Pemantauan Kegiatan PHLN Ocean for Prosperity – LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024; dan Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di BPSPL Makassar, dari 11 (sebelas) jumlah rekomendasi telah dilakukan tindak lanjut seluruhnya sehingga presentase capaian jumlah tindak lanjut sebesar 100%. Secara keseluruhan capaian indikator Pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan dukungan dan arahan dari pimpinan tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi oleh seluruh staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

E. Kegiatan pendukung

Capaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan yang setiap triwulan dilakukan oleh sekretariat Ditjen PK, koordinasi lintas unit kerja, pembahasan hasil pengawasan dan pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan/audit/pemantauan,

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dilakukan melalui mekanisme koordinasi internal dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus (anggaran Rp. 0).

G. Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2025 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.13 IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2024.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit DJPKRL sampai dengan waktu pengukuran.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:



3. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100.
4. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Tabel 19 Capaian IK 13 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
100	100	100	100	0	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar mencapai 100 atau 100% sesuai dari target yang ditetapkan sebesar 100. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor: 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan oleh BPK telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja organisasi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

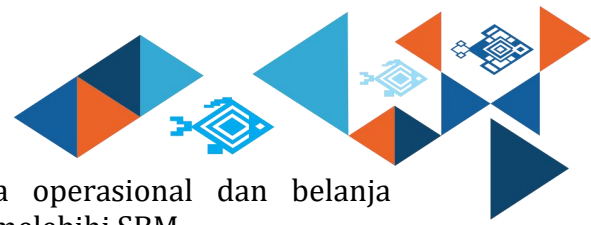
Capaian indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar mencapai 100 tahun 2025 dan tahun 2024, sehingga tidak ada peningkatan dan penurunan capaian pada indikator ini.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar menunjukkan capaian yang optimal, ditandai dengan penyelesaian seluruh temuan BPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen BPSPL Makassar dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh koordinasi yang efektif antara pimpinan BPSPL Makassar dan Tim penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemngawasaan oleh BPK, kejelasan pembagian tugas tindak lanjut temuan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap progres penyelesaian temuan BPK. Adapun sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor: 119/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PK Tahun 2025 menyampaikan bahwa UPT lingkup DJPK memiliki rekomendasi yakni perihal Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan dengan rekomendasi BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya supaya :



- a. Menghentikan kebijakan merealisasikan belanja operasional dan belanja nonoperasional yang tidak sesuai peruntukan dan melebihi SBM
- b. Memerintahkan KPA pada masing-masing satker terkait untuk :
 - 1) Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, dan
 - 2) Memerintahkan agar PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan Belanja Operasional dan Nonoperasional

Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan waktu yang ditetapkan.

E. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPSPL Makassar didukung melalui pelaksanaan koordinasi internal dalam rangka percepatan tindak lanjut temuan BPK, pembahasan hasil pemeriksaan, serta penugasan unit dan penanggung jawab tindak lanjut temuan secara jelas.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada I 2026 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila terpat audit, pemantauan dan evaluasi.

3.1.14 IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

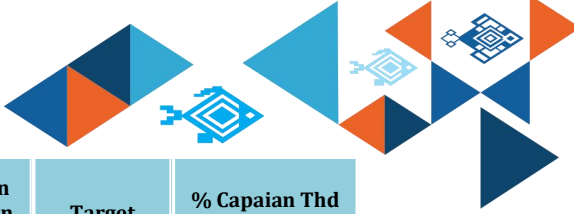
Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “sbnm67Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Jika pada tahun anggaran, tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 20 Capaian IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	
IK - 14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	
Tahun 2024	Tahun 2025	Renstra DJPKRL



Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
87,41	75	87,41	116,55%	0	-	-

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar tahun 2025 sebesar 87,41 atau 116,55% dari target sebesar 75. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja SDMAO Nomor: 127/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Keluatan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indikator kinerja Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar tahun 2025 sama dengan tahun 2024 sebesar 87,41, sehingga tidak ada peningkatan dan penurunan capaian pada indikator ini.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra DJPKRL 2025-2029 karena indikator kinerja ini tidak terdapat di Renstra DJPKRL 2025-2029.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sesuai dengan Nota Dinas Ketua Tim Kerja SDMAO Nomor: 127/DJPK.1/TU.210/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Keluatan capaian indikator. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar tahun 2025 sebesar 87,41. Pelaksanaan merupakan Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 -2025 tidak terdapat pemantauan yang dilakukan baik TPI maupun tim MenpanRB. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini salah satunya adalah karena adanya komitmen pimpinan yang selalu mengingatkan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga keterlibatan semua pegawai BPSPL Makassar.

E. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan BPSPL Makassar telah dilakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas terhadap unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2025 pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) pada tanggal 25 Februari s.d 3 Maret 2025 secara *Online*. Kegiatan ini dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN dan RB. BPSPL Makassar juga telah melakukan Wawancara terhadap Unit Kerja yang Diusulkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Tim Penilai Nasional Kementerian PANRB dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis, 31 Juli 2025. Setelah melakukan Wawancara BPSPL Makassar melaksanakan Evaluasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada 26 s.d 28 Agustus 2025 bertempat di BPSPL Makassar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.



G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain adalah pemenuhan rekomendasi dari Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.

3.1.15 IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

1. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

2. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI	INTERVAL SKOR
----------	---------------

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 – 70
CC	Cukup	>50 – 60
C	Kurang	>30 – 50
D	Sangat Kurang	0 – 30

Tabel 21 Capaian IK 15 Nilai Unit pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar					
IK - 15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra DJPKRL	
Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
80,85	70	85	121,43%	4,15	80	106,25%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar sebesar 85 atau 121,43% dari target tahun 2025 sebesar 70. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada tahun 2025 sebesar 85 sedangkan capaian pada tahun 2024 sebesar 80,85, hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,15.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025 yaitu 70 sedangkan target pada Renstra DJPK 2025-2029 yaitu 80, hal ini menunjukkan adanya peningkatan target sebesar 10 poin. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 yaitu 85 dengan persentase capaian sebesar 121,43. Sedangkan persentase capaian indikator ini jika dibandingkan dengan Renstra DJPK tahun 2025 sebesar 106,25, hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar masih diatas target renstra.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor: 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025 BPSPL Makassar mendapatkan hasil sebesar 85 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian:

- Nilai Aspek PAD (Pengelolaan Arsip Dinamis): 70,00.
- Nilai Aspek SDK (Sumber Daya Kearsipan): 15,00.
- Total Nilai Akhir (PAD + SDK): 85,00.



Dari hasil penilaian tersebut BPSPL Makassar posisi BPSPL Makassar memperoleh peringkat di Lingkup Eselon 1 (Ditjen PKRL) Peringkat 4 dari seluruh UPT di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Peringkat Tingkat KKP Peringkat 65 dari total seluruh Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan penilaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penilaian tersebut masih terdapat kelemahan yakni pada spek Sumber Daya Kearsipan (SDK) yang hanya mencapai skor 15,00. Rendahnya nilai SDK ini berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan jabatan Arsiparis yang sampai saat ini masih belum terdapat pada BPSPL Makassar.

Terdapat perbedaan mendasar dalam metode perhitungan Nilai Pengawasan Internal Kearsipan BPSPL Makassar antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Pada Tahun 2024, sistem penilaian menggunakan total nilai standar yang relatif besar (2.600 poin) dengan mekanisme pembobotan berjenjang, yaitu nilai capaian dibandingkan terlebih dahulu dengan nilai standar masing-masing subaspek, kemudian dikalikan bobot subaspek, dan selanjutnya dikalikan kembali dengan bobot aspek (70% untuk Pengelolaan Arsip Dinamis dan 30% untuk Sumber Daya Kearsipan). Perhitungan ini bersifat proporsional dan komprehensif karena seluruh subaspek—penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, serta SDM dan sarana prasarana—tetap diperhitungkan dalam struktur pembobotan, sehingga hasil akhir merupakan agregasi dari seluruh komponen yang dinormalisasi.

Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan cara menghitung. Total nilai standar disederhanakan menjadi 1.200 dan sistem perhitungan tidak lagi menggunakan skema normalisasi berjenjang yang kompleks, melainkan langsung berbasis skala 100 sebelum dikalikan bobot aspek. Selain itu, terjadi redistribusi bobot subaspek di dalam Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, di mana penyusutan arsip tidak lagi dinilai (bobot 0%), dan bobotnya dialihkan sehingga penciptaan dan penggunaan arsip masing-masing menjadi 0,28 serta pemeliharaan arsip menjadi paling dominan dengan bobot 0,44. Pada Aspek Sumber Daya Kearsipan juga terjadi perubahan signifikan karena hanya subaspek SDM yang dinilai (bobot 1,00 dalam aspek), sementara sarana dan prasarana tidak diperhitungkan. Dengan metode ini, nilai akhir Tahun 2025 dihitung secara lebih sederhana, yaitu total nilai subaspek dalam suatu aspek dikalikan langsung dengan bobot aspek (0,70 dan 0,30), sehingga diperoleh nilai akhir 85 dengan kategori A (Memuaskan).

Secara analitis, perubahan Tahun 2025 menunjukkan penyederhanaan sistem sekaligus pergeseran fokus penilaian dari pendekatan yang menyeluruh terhadap seluruh unsur kearsipan menjadi pendekatan yang lebih menekankan efektivitas pengelolaan arsip aktif dan kapasitas SDM. Sistem 2025 menjadi lebih transparan dan mudah dipahami, namun juga lebih sensitif terhadap kinerja pada subaspek yang diberi bobot dominan, terutama pemeliharaan arsip dan SDM kearsipan. Dengan demikian, meskipun bobot aspek utama tetap 70% dan 30%, perubahan distribusi bobot subaspek dan metode penghitungan menyebabkan perbedaan karakter evaluasi antara Tahun 2024 dan Tahun 2025.

E. Kegiatan pendukung

Dalam menunjang indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan IV adalah pelaksanaan Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PKRL yang bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian yaitu terlaksananya digitalisasi arsip di lingkungan KKP. BPSPL Makassar juga melakukan Verifikasi Data



Pengawasan Kearsipan Internal lingkup UPT selaku Unit Pengolah Tahap IV tahun 2025 yang dilaksanakan pada 9 September 2025 secara daring dan pelaksanaan Asistensi Persiapan Penilaian Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup UPT pada Rabu – Kamis, 6 – 7 Agustus 2025 Secara daring. Pengisian Data Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2025 Lingkup Ditjen PKRL dan dengan adanya pembaruan teknis sistem pengisian data serta batas waktu yang telah ditentukan BPSPL Makassar menghadiri kegiatan Persiapan pengawasan internal kearsipan dan Pengisian Form ASKII yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025 bertempat di Ruang Rapat Kawaluso Lt. 9 GMB 3.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan penilaian kearsipan tahun 2026.

3.1.16 IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

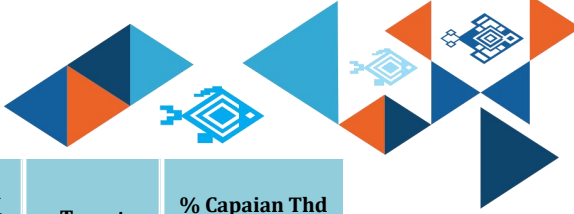
Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 22 Capaian IK 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	
IK - 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	
Tahun 2024	Tahun 2025	Renstra DJPKRL

Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
-	76	100	131,58%	-	76	131,58%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja ini sebesar 100 dari target Triwulan IV dan tahunan sebesar 76 dengan presentase 131% dari target sebesar 76. Capaian IK ini tertuang dalam Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025.

B. Perbandingan Capaian Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu karena indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 76 dengan tingkat capaian sebesar 131,58%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 yang juga ditetapkan sama yaitu 76, maka capaian terhadap Renstra juga mencapai 131,58%, sehingga target tahun pertama Renstra berhasil dipenuhi.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung indikator ini dikarenakan koordinasi yang baik antara operator SIRUP dengan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK dalam penyusunan dokumen pengadaan dan penginputan sirup secara tepat waktu.

E. Kegiatan pendukung

Sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah mengikuti asistensi dan diskusi terkait penyesuaian SIRUP pasca efisiensi anggaran tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan PBJ pada 12 Maret 2025 secara *online* dan pelaksanaan revisi Rencana umum pengadaan pada Bulan Juli, Agustus, dan November dan Desember dalam mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi kegiatan LAUTRA dan Penambahan anggaran yang bersumber dari penggunaan dana PNBK.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian indikator ini tersebut tidak menggunakan anggaran pada Triwulan IV sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain adalah Penyusunan Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2026.

3.1.17 IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup BPSPL Makassar sesuai dengan kriteria:

- informatif dengan nilai 97-100;
- menuju informatif dengan nilai 80-96;
- cukup informatif dengan nilai 60-79;
- kurang informatif dengan nilai 40-59;
- tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai

Informasi akan berakibat pada pengurangan nilai								
No	ASPEK YANG DINILAI	SUB-NILAI	PRESENTASI	TOTAL	BOBOT	HASIL		
TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare)								
1	Mengumumkan Informasi Publik	15	60%	60	80%	80		
2	Menyediakan Dokumen Informasi	25						
3	Sarana Prasarana	30	40%	40				
4	Kelembagaan	20						
5	Digitalisasi	10						
Jumlah		100	100%	100				
TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INOFORMASI PUBLIK								
1	Presentasi Publik	100	100%	100	20%	20		
Jumlah		100	100%	100				
TOTAL NILAI KESELURUHAN					100%	100		

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 23 Capaian IK 17 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)

SS -7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	
IK - 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	
Tahun 2024	Tahun 2025	Renstra DJPKRL



Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi tahun 2025	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2024	Target	% Capaian Thd Renstra
-	91	100	109,89%	-	91	109,89%

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar sebesar 100 atau sebesar 109,89% dari target sebesar 91. Capaian ini sesuai dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 Tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan Tahun 2024 karena IKU merupakan indikator kinerja baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra 2025-2029

Realisasi Tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 91 dengan tingkat capaian sebesar 109,89%. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029 yang juga ditetapkan sama yaitu 91, maka capaian terhadap Renstra juga mencapai 109,89%, sehingga target tahun pertama Renstra berhasil dipenuhi.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Dikarenakan capaian dihitung secara tahunan maka analisis keberhasilan dan kegagalan serta solusi tidak dapat dilakukan.

E. Kegiatan pendukung

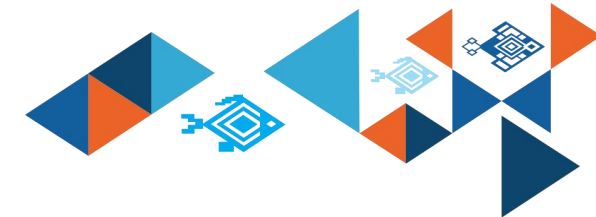
Dalam menunjang indikator kinerja ini BPSPL Makassar melakukan Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh tim pengelola PPID pada Aplikasi PELIKAN dalam menunjang Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan pada bulan September Tahun 2025 di lokasi kantor BPSPL Makassar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

G. Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan I 2026 antara lain adalah pemenuhan dokumen pendukung dalam pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik.

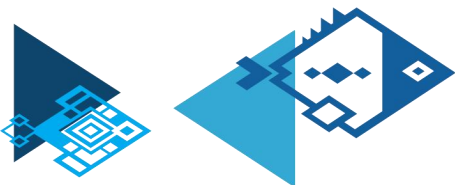


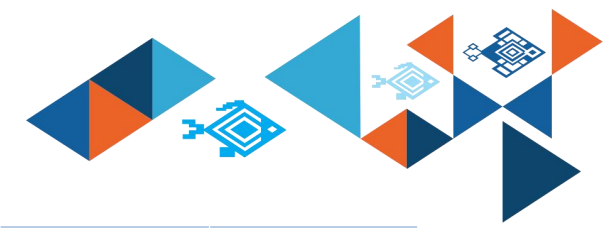
3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

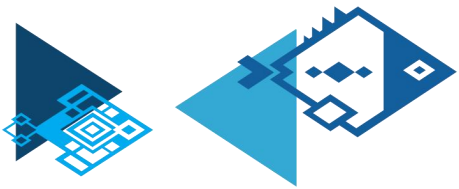
Tabel 24. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

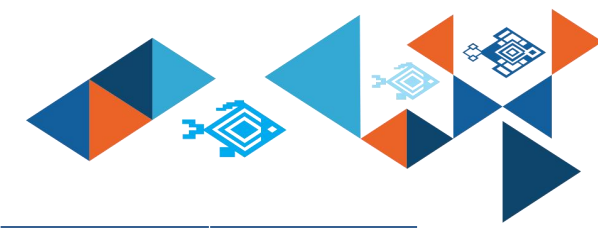
Indikator Kinerja			BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	Target	4	1	1	1	1	3
		Capaian	4	1	5	1	6	6
		%	100%	100%	500%	100%	600%	200%
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	Target	40	24	5	30	11	20
		Capaian	70	24	6	30	11	27
		%	175%	100%	120%	100%	100%	135%
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	Target	5	4	3	5	5	3
		Capaian	10	9	7	7	7	5
		%	200%	225%	200,3%	140%	140%	167,7%
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	99,91	100	96	90	96	99,92



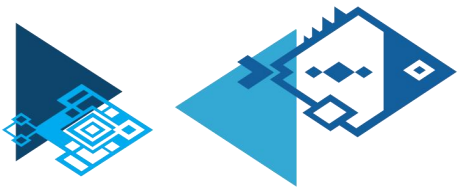


	Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	%	124,9%	125%	120%	112,5%	120%	124,9%
5	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	2	2	2	2	2	2
		Capaian	2	2	2	2	2	2
		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	1	1	1	1	1	1
		Capaian	1	1	1	1	1	1
		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	70	70	70	70	70	70
		Capaian	92	88,25	94,15	86,90	89,60	88,10
		%	131,4%	126,4%	134,5%	124,1%	128%	125,8%
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	89	89	89	89	89	89
		Capaian	89,73	95,79	98,14	94,11	96,52	78,04
		%	100,8%	107,6%	110,2%-	105,7%	108,4%	87,7%
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	Target	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		Capaian	100	98,57	97,14	97,86	98,33	98,57
		%	139,9%	137,9%	135,9%	136,9%	137,5%	137,9%
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	Target	4	4	4	4	4	4
		Capaian	4	4	4	4	4	4
		%	100	100	100	100	100	100
11	Indeks Profesionalitas ASN	Target	80	80	80	80	80	80





	Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	Capaian	89,82	86,43	89,04	86,85	88,42	85,95
		%	112,3%	108,0%	111,3%	108,6%	110,5%	107,4%
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja ingkup BPSPL Makassar (%)	Target	95	95	95	95	95	80
		Capaian	100	100	100	87	100	98
		%	105,3	105,26	105,26	91,6%	105,26	105,26
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	100	100	100	100	100	100
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	Target	75	85	85	75	75	75
		Capaian	87,41	90,81	90,4	87,57	80,04	81,64
		%	116,5%	106,8%	106,4%	116,8%	106,7%	108,9%
15	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	Target	70	80	70	80	80	80
		Capaian	85	99,40	81,5	86,11	80,59	88,50
		%	121,4%	124,3%	116,4%	107,6%	100,7%	110,6%
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	Target	76	76	76	76	76	76
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	131,6%	131,6%	131,6%	131,6%	131,6%	131,6%
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	Target	91	91	91	91	91	91
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	109,9%	109,9%	109,9%	109,9%	109,9%	109,9%



3.3 Akuntabilitas Keuangan

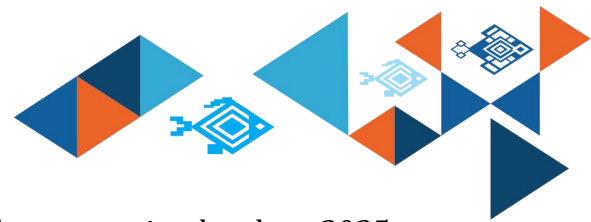
Tabel 25. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2025

Kegiatan	Anggaran			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	25.088.930.000	7.100.452.271	28,30%	17.988.477.729
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000	242.671.940	80,89%	57.328.060
Penataan Ruang Laut	3.900.776.000	3.304.571.236	84,72%	596.204.764
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.509.617.000	11.833.374.145	94,59%	676.242.855
TOTAL	41.799.323.000	22.481.069.592	53,78%	19.318.253.408

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2025, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp41.799.323.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNPB dan PLN (Pinjaman Luar Negeri) dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar **Rp22.481.069.592,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** atau dengan prosentase sebesar **53,78%** dari pagu total. Adapun realisasi tersebut adalah realisasi dengan blokir. Apabila realisasi **tanpa blokir adalah sebesar 64,64%** Dimana ada blokir sebesar **Rp7.020.108.000,-**. Sisa anggaran adalah sebesar **Rp19.318.253.408,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah)**.

Sampai dengan akhir tahun 2025 revisi anggaran sudah dilaksanakan 15 (lima belas) kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:

1. Revisi 1 dalam rangka Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431/2025 untuk revisi penyesuaian kebutuhan pada sub komponen operasional dan pemeliharaan kantor sesuai dengan surat nomor: B.74/BPSPL.3/RC.420/I/2025 pada tanggal 09 Januari 2025;
2. Revisi 2 dalam rangka revisi Petunjuk operasional Kegiatan (POK) sesuai dengan kewenangan KPA, revisi ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada komponen operasional dan pemeliharaan kantor tanggal 13 Januari 2025;



3. Revisi 3 dalam rangka efisiensi anggaran kebijakan pemerintah tahun 2025 pada 22 Februari 2025;
4. Revisi 4 dalam rangka revisi halaman 3 DIPA sesuai dengan surat Plt Kepala BPSPL Makassar No: B.339/BPSPL.3/RC.420/IV/2025 Tanggal 17 April 2025;
5. Revisi 5 Pembukaan Blokir anggaran yang bersumber dari PNPB Sebesar Rp. 900.000.000,- melalui surat Plt. Kepala BPSPL Makassar nomor: B.445/BPSPL
6. Revisi 6 Dalam rangka pemuktahiran POK tanggal 3 Juni 2025 dalam menudukung pelaksanaan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem. pelaksanaan revisi ini melakukan pergeseran antar akun belanja dalam satu komponen;
7. Revisi 7 dalam rangka pembukaan blokir Penunjang Pelayanan dalam kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Perizinan Pulau-pulau Kecil, Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut1 dan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut tanggal 9 Juni 2025;
8. Revisi 8 dalam rangka revisi halaman 3 DIPA sesuai dengan surat Plt Kepala BPSPL Makassar No: B.633/BPSPL.3/RC.420/VII/2025 Tanggal 11 Juli 2025 perihal : Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431/2025, revisi ini melakukan pergeseran antar akun belanja pada kegiatan 2362.REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem komponen 051 Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera dan penambahan kegiatan AA Reviu-Update Rencana Zonasi KKD Banggai Dalaka sebesar Rp. 854,134,000;
9. Revisi 9 Pemuktahiran POK sesuai denban surat Nomor : B.824/BPSPL.3/RC.420/VIII/2025 tanggal 10 Agustus 2025 perihal : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. revisi ini bertujuan melakukan revisi pegeseran antar akun belanja barang (52) dalam satu komponen pada kegiatan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem pada kegiatan yang telah dilaksanakan;
10. Revisi 10 Pemuktahiran POK sesuai denban surat Nomor :B.1136/BPSPL.3/RC.420/IX/2025 tanggal 11 September 2025 perihal : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi ini bertujuan melakukan revisi pegeseran antar akun belanja barang (52) dalam satu komponen pada kegiatan Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem, operasional dan pemeliharaan kantor dan kegiatan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut;
11. Revisi 11 dalam rangka revisi halaman 3 DIPA sesuai dengan surat Kepala BPSPL Makassar No:: B.1314/BPSPL.3/RC.420/X/2025 Tanggal 12 oktober 2025 perihal : Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431/2025, revisi ini melakukan pergeseran halaman 3 DIPA antar akun belanja pada kegiatan 2362.REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem komponen 051 Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang Lautan Sejahtera;
12. Revisi 12 Dalam rangka penambahan Pagu PNPB Pemanfaatan ruang Laut Sebesar Rp. 3.022.166.000 untuk kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Petugas Pemanfaatan Ruang Laut, Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Sarana Prasarana Pemanfaatan Penataan ruang Laut tanggal 1 November 2025;
13. Revisi 13 dalam rangka revisi DIPA kewenangan Kanwil DJPB sesuai dengan surat Kepala BPSPL Makassar No: B.1458/BPSPL.3/RC.420/XI/2025 Tanggal



10 November 2025 perihal : Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431/2025, revisi ini melakukan pergeseran 52 Menjadi 53 Perdeseran dan anggaran antar komponen dalam rangka mendukung pelaksanaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah;

14. Revisi 14 Dalam rangka Revisi dipa kewenangan DJA untuk pergeseran kelebihan belanja pegawai (51) BPSPL Makassar ke Sesditjen PK sebesar Rp. 1.036.973.000 tanggal 20 November 2025;
15. Revisi 15 Dalam rangka pemuktahiran : Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan Sesuai Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor : B.1542/BPSPL.3/RC.420/XI/2025 tanggal 23 November 2025 perihal permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan, Adapun revisi dilakukan untuk pemenuhan kegiatan dan pergeseran anggaran kegiatan penambahan PNPB antara lain kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Petugas Pemanfaatan Ruang Laut, Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Sarana Prasarana Pemanfaatan Penataan ruang Laut.

Pada tahun 2025 Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut Makassar mengalami 2 kali perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Awal BPSPL Makassar ditetapkan pada 24 Januari 2025 masih mengacu pada struktur Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKL) dengan jumlah indikator sejumlah 16 Indikator Kinerja dan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.810.520.000 yang berasal dari 4 kegiatan yakni Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penataan Ruang Laut, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Revisi pertama perjanjian kinerja BPSPL Makassar ialah melakukan revisi perjanjian kinerja untuk Direktorat Jenderal yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPKL). Perjanjian Kinerja dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan ditetapkan pada 30 Juni Tahun 2025, dengan perubahan adanya tambahan IKU Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai) dengan target sejumlah 80, dan pengurangan IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen) sehingga indikator kinerja pada Perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berjumlah 16 Indikator. Jumlah anggaran pada perjanjian kinerja juga mengalami perubahan menjadi 38.935.520.000 dan berasal dari kegiatan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Sedangkan perjanjian kinerja dengan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPKL) dengan satu indikator kinerja yakni Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 875.000.000,-. Revisi perjanjian kinerja ke dua pada BPSPL Makassar dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPKL) pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) ada perubahan target pada indikator Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan





Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang) yang semula target 175 menjadi 40 dan perubahan anggaran menjadi Rp. 37.898.547.000,-. Sedangkan untuk Perjanjian dengan Direktorat Penataan Ruang Laut (DJPRL) hanya terdapat perubahan anggaran menjadi Rp3.900.776.000,-





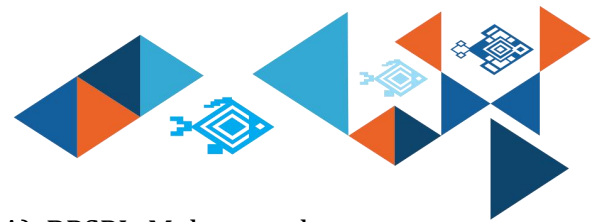
IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2025 adalah kategori **Istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **110,23 %**, sementara capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 sebesar **Rp. 22.481.069.592,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)** atau dengan prosentase sebesar **53,78%** dari pagu total **Rp 41.799.323.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**. Terdapat Blokir anggaran sebesar **Rp. 7.020.108.000,- (Tujuh Milyar Dua Puluh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)**, sehingga presentasi realisasi tanpa blokir sebesar **64,64%** .

Capaian Indikator Kinerja Manajerial pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Daerah yang difasilitasi dalam penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan target sebanyak 4 provinsi. Realisasi pelaksanaan telah mencakup 4 provinsi, sehingga target kinerja tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%;
2. Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan target sebanyak 40 orang. Realisasi kinerja mencapai 70 orang, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 175% atau tercatat sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku;
3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan target sebanyak 5 jenis. Realisasi kinerja mencapai 10 jenis, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 200% atau tercatat sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku;
4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan target kinerja sebesar 80 dan realisasi kinerja sebesar 99,91 yang telah melampaui target dengan % capaian 124,89% atau 120 % pada aplikasi Kinerjaku;
5. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan target sebanyak 2 dokumen. Realisasi kinerja mencapai 2 dokumen, sehingga target telah terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 100%;
6. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan target sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja mencapai 1 dokumen, sehingga target telah terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 100%;
7. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar dengan target sebesar 70. Realisasi kinerja mencapai nilai 92, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 131,42% atau tercatat sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku.

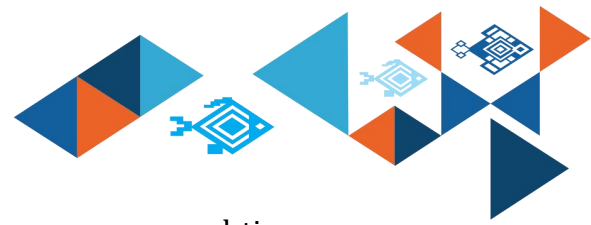


8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Makassar dengan target sebesar 89. Realisasi kinerja mencapai 89,93, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 100,82%
9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar dengan target sebesar 71,5. Realisasi kinerja mencapai nilai 100, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 139,86% atau tercatat sebesar 120% pada aplikasi Kinerjaku;
10. Laporan SPIP yang disusun di lingkup BPSPL Makassar dengan target sebanyak 4 laporan. Realisasi kinerja mencapai 4 laporan, sehingga target telah terpenuhi dengan persentase capaian sebesar 100%;
11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Makassar dengan target sebesar 80. Realisasi kinerja mencapai 89,82, sehingga melampaui target dengan persentase capaian sebesar 112,28%;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar dengan target sebesar 95%. Realisasi kinerja mencapai 100%, sehingga melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 105%;
13. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi kinerja juga mencapai 100%, sehingga target telah terpenuhi dengan tingkat capaian sebesar 100%;
14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar dengan target kinerja sebesar 75. Realisasi kinerja mencapai 87,41, sehingga melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 116,55%;
15. Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar dengan target kinerja sebesar 70. Realisasi kinerja mencapai 85, sehingga melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 121,43%. Adapun pada aplikasi Kinerjaku tercatat capaian sebesar 120%;
16. Persentase rencana umum pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar dengan target kinerja sebesar 76%. Realisasi kinerja mencapai 85%, sehingga melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 131,58%. Adapun pada aplikasi Kinerjaku tercatat capaian sebesar 120%;
17. Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT lingkup BPSPL Makassar ditetapkan dengan target kinerja sebesar 91. Realisasi kinerja mencapai 100, sehingga melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,89%.

Di balik capaian kinerja tahun 2025 yang memperoleh predikat “Istimewa”, BPSPL Makassar menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks seiring perubahan kebijakan organisasi dan tata kerja UPT bidang penataan ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025. Tantangan tersebut semakin besar dengan bertambahnya wilayah kerja dari 6 (enam) provinsi di Pulau Sulawesi menjadi 9 (sembilan) provinsi yang mencakup Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, yang memiliki karakteristik biofisik, sosial, dan tata ruang yang beragam. Selain itu, jumlah SDM ASN mengalami penurunan dari 68 (enam puluh delapan) orang pada tahun 2025 menjadi 56 (lima puluh enam) orang pada tahun 2026, sehingga berdampak pada peningkatan beban kerja dan perlunya penguatan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, seiring dengan bertambahnya luas wilayah kerja, BPRL Makassar perlu memperkuat sistem digital spasial terintegrasi yang





menghubungkan data zonasi, konservasi, dan perizinan secara real-time guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Penguatan kapasitas SDM juga perlu dilakukan melalui pelatihan teknis, antara lain di bidang GIS, AMDAL, pengoperasian drone, dan pemodelan hidro-oseanografi. Selain itu, diperlukan penambahan petugas untuk mendukung optimalisasi pelayanan perizinan KKPRIL agar tetap efektif dan tepat waktu

4.2 Rekomendasi

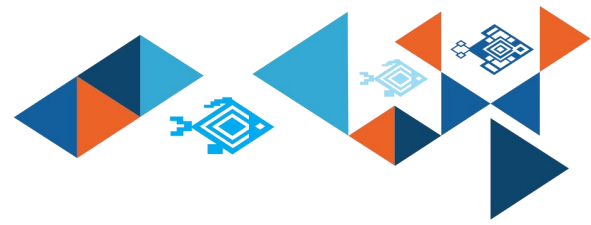
Terdapat rekomendasi untuk mendukung kinerja pada Tahun 2026, maka direkomendasikan adanya pelaksanaan dialog kinerja pada triwulan I. Pelaksanaan dialog kinerja ini untuk menentukan atau *Refreshment* anggota tim kelompok kerja, proses cascading atau penyusunan MPH, serta Langkah taktis untuk meningkatkan kinerja BPSPL Makassar tahun 2026.

4.3 Tindak Lanjut

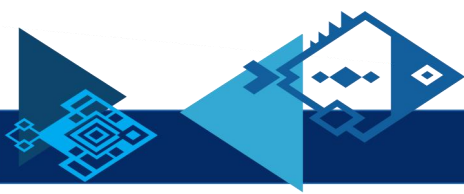
Terdapat rekomendasi pada Triwulan III Tahun 2025 yang harus dilakukan tindak lanjut pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 26. Tindak lanjut atas rekomendasi TW III Tahun 2025

Rekomendasi TW III Tahun 2025	Tindak Lanjut atas Rekomendasi TW III Tahun 2025	Tautan Data Dukung
penyampaian kepala BPSPL Makassar kepada ketua tim kerja untuk melakukan akselesari kegiatan lautra pasca realokasi OMS	Telah dilakukan penyampaian kepala BPSPL Makassar kepada ketua tim kerja untuk melakukan akselesari kegiatan lautra pasca realokasi OMS	https://drive.google.com/file/d/14hVbH6yGXGtIHcWZ9q0-9n1dElqRbRHC/view?usp=drive_link



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR**

NOTA DINAS
NOMOR 10/BPSPL.3/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Makassar
Dari : Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Kinerja Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan laporan capaian kinerja Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja pada Tim Kerja Perlindungan dan Pelestarian Tahun 2025 sebagaimana terlampir (lampiran I) dan bahan laporan pada tautan berikut <https://bit.ly/LaporanBPSPLTahun2025>.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan sebagai bahan laporan dan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih..



Ditandatangani
Secara Elektronik

Munandar Jakasukmana

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum

Lampiran I

Nomor : 10/BPSPL.3/RC.610/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE (%)	KETRANGAN
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4	4	100%	Capaian Indikator kinerja melalui Pelaksanaan Lautra di 4 Provinsi : 1. Kawasan Konservasi Laut Sulawesi (Sulawesi Utara) 2. Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo (Sulawesi Tenggara) 3. Kawasan Konervasi Daerah Teluk Gorontalo (Gorontalo) 4. Kawasan Konservasi Daerah Banggai Dalaka (Sulawesi Tengah)
2	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis	5	10	200%	Capaian Indikator kinerja ini melalui pelayanan rekomendasi dan SAJI jenis ikan dilindungi dan/atau look a like species 10 Jenis dengan rincian : 1. SAJI DN: 175 2. Rekomendasi DN: 906 3. Rekomendasi LN : 85 - Jenis Appendiks /dilindungi: Arwana, BCF, Napoleon, Hiu, Napoleon, Pari, Sidat, - Jenis Look alike : Teripang, anemon , soft coral
3	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota	3	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan	80	99,91	125%	Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan dengan skor akhir sebesar 99,91 . Penilaian tersebut mencakup beberapa aspek, dengan hasil sebagai berikut:

	di Wilayah Kerja BPSPL Makassar		Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)				1. Proses Penerbitan Surat Rekomendasi (bobot 40%) memperoleh nilai maksimal sebesar 40. 2. Proses Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) (bobot 40%) dengan nilai aspek sebesar 40. 3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (bobot 10%) nilai akhir sebesar 9,9148. 4. Inovasi dan Konvensi (bobot 10%) memperoleh nilai maksimal sebesar 10
--	------------------------------------	--	---	--	--	--	---



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Munandar Jakasukmana

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
BALAI PENATAAN RUANG LAUT MAKASSAR**

NOTA DINAS
NOMOR 11/BPSPL.3/RC.610/I/2026

Yth. : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Makassar
Dari : Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Kinerja Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan laporan capaian kinerja Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja pada Tim Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 sebagaimana terlampir (lampiran I) dan bahan laporan pada tautan berikut <https://bit.ly/LaporanBPSPLTahun2025>.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan sebagai bahan laporan dan pertimbangan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih..



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nur Masyitha Nurdin

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum

Lampiran I

Nomor : 11/BPSPL.3/RC.610/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE (%)	KETRANGAN
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	1	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	40	70	175%	Capaian indikator kinerja melalui pelaksanaan kegiatan Penjangkauan - Lautra di 4 Kawasan dengan jumlah peserta sejumlah 70 Orang (64 laki-laki, 6 Perempuan) dengan rincian antara lain : 1. Kawasan Konservasi Laut Sulawesi dengan jumlah peserta 20 orang (18 Laki-laki, 2 Perempuan) 2. Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo dengan jumlah peserta 15 orang (12 Laki-laki, 3 Perempuan) 3. Kawasan Konservasi Daerah Teluk Gorontalo dengan jumlah peserta 15 orang (15 Laki-laki, 0 Perempuan) 4. Kawasan Konservasi Daerah Banggai Dalaka dengan jumlah peserta 20 orang (15 Laki-laki, 0 Perempuan)
2	Terselenggaranya pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	2	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2	3	150%	Capaian Indikator kinerja ini melalui pelaksanaan Verifikasi/penilaian, sosialisasi, dan monitoring/pengendalian pemanfaatan ruang laut dengan capaian 3 Dokumen

3	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1	1	100%	Capaian indikator kinerja ini melalui pelaksanaan inventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 1 Dokumen dengan 26 Pulau yang telah teridentifikasi 90 Pelaku usaha dgn potensi PNPB 532.485.000
---	--	---	---	---	---	------	--



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nur Masyitha Nurdin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
MAKASSAR

JALAN MAKMUR DAENG SITAKKA NOMOR 129 MAROS 90511,
TELEPON (0411) 371337 FAKSIMILI (0411) 371337
LAMAM www.kkp.go.id SUREL: bpsplmakassar@kkp.go.id

Nomor : B.3/BPSPL.3/PRL.430/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Halaman
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri
Kinerja Pelayanan

02 Januari 2026

Yth. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik
di Jakarta

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penilaian Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar secara mandiri, terlampir kami sampaikan hasil penilaian yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar,



Ditandatangani
Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma

Lampiran Surat Undangan
 Nomor : B.3/BPSPL.3/PRL.430/I/2026
 Tanggal : 02 Januari 2026

Penilaian Mandiri Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di
 Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Link Data Dukung
Proses Penerbitan Surat Rekomendasi	40%	Dashboard Surat Rekomendasi	10%	100	10	40	https://bit.ly/4pVMBsy
		Rekap Penerbitan	10%	100	10		
		Dokumen diarsipkan	10%	100	10		
		Kesesuaian Baku Waktu Pelayanan	40%	100	40		
		Penanganan Pengaduan	10%	100	10		
		Jumlah Permohonan yang Diproses	10%	100	10		
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	100	10		
Proses Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI)	40%	Dashboard SAJI	10%	100	10	40	https://bit.ly/4pVMBsy
		Rekap Penerbitan	10%	100	10		
		Dokumen diarsipkan	10%	100	10		
		Keseusain Baku Waktu Pelayanan	40%	100	40		
		Penanganan Pengaduan	10%	100	10		
		Jumlah Permohonan yang Diproses	10%	100	10		
		Penggunaan Sistem Informasi	10%	100	10		
Survey Kepuasan Masyarakat	10%	Dilaksanakan	70%	100	70	9.915	https://bit.ly/3N2gn0b
		Nilai SKM					
Inovasi dan Konvensi	10%	Terdapat Inovasi	50%	100	50	10	https://bit.ly/44TTJNl
		Penerapan Konvensi					
			50%	100	50		
		Total Skor	99.91				

Kepala Balai Pengelolaan Sumber
 Daya Pesisir dan Laut Makassar,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

A Muhammad Ishak Yusma

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
5. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal
6. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
7. Para Kepala Pusat lingkup Badan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Kepala Biro Umum

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025

Tanggal : 21 November 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan unit organisasi Saudara. Selanjutnya dimohon kepada Saudara untuk melakukan koordinasi di lingkungan organisasi masing-masing untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan kesadaran dan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai ketentuan.
2. Identifikasi, penataan dan penyediaan daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.
3. Melaksanakan program arsip vital organisasi dan membuat daftar arsip vital.
4. Unit organisasi menyampaikan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.
5. Pelaksanaan penyusutan arsip secara berkala sesuai dengan prosedur/ketentuan yang terdiri:
 - a) kegiatan penyusutan arsip aktif dengan melakukan pemindahan arsip yang telah memasuki retensi akhir arsip aktif/pemindahan inaktif ke *record center*;

- b) kegiatan penyusutan arsip inaktif dengan melakukan penilaian arsip yang telah memasuki retensi akhir untuk pemusnahan arsip atau penyerahan arsip statis.
6. Melakukan pengaturan dan penempatan arsip pada prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan yaitu sarana kearsipan meliputi folder arsip, guide/sekat arsip, boks arsip, dan rak arsip.
 7. Melakukan penataan, pengaturan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan yaitu ruang arsip atau ruangan yang ditunjuk dan difungsikan sebagai ruang arsip.
 8. Setiap unit organisasi melakukan peningkatan kompetensi SDM Arsiparis dan bagi yang belum memiliki arsiparis agar segera melakukan pengisian sesuai peta jabatan. dan Unit Kearsipan II (Sekretariat Ditjen, Sekretariat Itjen, Sekretariat Badan) agar dapat memenuhi/mengisi SDM Arsiparis sesuai peta jabatan dan melengkapi setidaknya sampai dengan jenjang arsiparis ahli muda.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

Nomor : 2021/SJ.6/TU.220/XI/2025

Tanggal : 21 November 2025

**DAFTAR HASIL VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
PADA UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025**

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD (x 50%)	NILAI ASPEK SDK (x 50%)	NILAI ASPEK PAD+SDK (100%)	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
Sekretariat Jenderal							
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	68.66	30.00	99.33	AA (SANGAT MEMUASKAN)	3	1
2	Biro Perencanaan	67.38	27.75	95.13	AA (SANGAT MEMUASKAN)	14	2
3	Biro Keuangan	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	21	3
4	Pusat Data Statistik dan Informasi	54.68	30.00	84.68	A (MEMUASKAN)	31	4

NO.	UNIT PENGOLAH	NILAI ASPEK PAD	NILAI ASPEK SDK	NILAI ASPEK PAD+SDK	KATEGORI	PEMERINGKATAN TINGKAT KKP	PEMERINGKATAN DI LINGKUP ESELON 1 MASING-MASING
		(x 50%)	(x 50%)	(100%)			
5	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Makassar	70.00	15.00	85.00	A (MEMUASKAN)	65	4
6	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	59.40	25.50	84.90	A (MEMUASKAN)	66	5
7	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	63.00	18.50	81.50	A (MEMUASKAN)	84	6
8	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Serang	58.84	21.75	80.59	A (MEMUASKAN)	91	7
9	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	62.00	18.50	80.50	A (MEMUASKAN)	92	8
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap							
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	65.36	30.00	95.36	AA (SANGAT MEMUASKAN)	13	1
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	70.00	24.00	94.00	AA (SANGAT MEMUASKAN)	16	2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026 12 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara Semester II Tahun 2025 lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Yth. 1. Direktur lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan
2. Kepala UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan

Di Tempat

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor : 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026, bersama ini di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran pada Dashboard IP ASN KKP per tanggal 31 Desember 2025, nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025, yaitu sebesar **86,84** (kategori tinggi) terdiri dari :
 - a. Kualifikasi sebesar 22,49;
 - b. Kompetensi sebesar 33,16;
 - c. Kinerja sebesar 26,2;
 - d. Disiplin sebesar 4,99.
2. Prosentase hasil diatas sebesar **108,55%** melebihi target Semester II Tahun 2025 sebesar 80 (kategori Tinggi), sehingga capaian seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditetapkan di awal tahun (rekap detail terlampir).
3. Target tahunan nilai Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada tahun 2026 telah ditetapkan, untuk **Semester I** sebesar **77** dan **Semester II** sebesar **81**. Berkenaan dengan hal tersebut kiranya Saudara dapat mendorong para pegawai untuk melakukan peningkatan Kualifikasi, Kinerja, Disiplin dan Kompetensi terutama komponen Diklat 20 JP (PNS) dan 24 JP (PPPK) baik yang diselenggarakan oleh internal KKP maupun diluar instansi yang sifatnya menunjang tugas fungsi pegawai.
4. Hasil Analisis dan Rekomendasi atas Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Sekretaris Deputy Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara Nomor 15014/BBM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga **BKN sudah tidak melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**, dikarenakan penerapan **Manajemen Talenta** dimana adanya penggabungan IP ASN dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini menjadikan IKU IP ASN di Lingkungan KKP tidak dapat menjadi Output Kendali Rendah karena penilaian IP ASN secara mandiri di KKP, tetapi sumber database pengukuran IP ASN KKP tetap dari database Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN.
 - b. IP ASN memiliki 4 (empat) dimensi pengukuran yaitu Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), dan Disiplin (bobot 5), dari ke empat dimensi terdapat unsur yang sangat memegang peran penting yaitu Penilaian Kinerja/SKP, karena **predikat SKP** akhir periode (tahun sebelumnya) **dihitung 2 (dua)** kali, pada dimensi Kinerja (bobot 30) dan pada dimensi Kompetensi, predikat SKP mendapatkan bobot 25, sehingga apabila seorang ASN mendapatkan predikat SKP Sangat Baik, IP ASN sudah mendapatkan nilai 55. Hal ini menjadi rekomendasi agar para pengelola SKP, pengelola data pegawai atau IP ASN, sebagai berikut:
 - 1) selalu monitoring nilai predikat SKP seluruh pegawainya, apakah **predikat SKP** di aplikasi eKinerja BKN sudah **sinkronisasi** ke aplikasi **SIASN** BKN;
 - 2) input data **riwayat kinerja** di aplikasi SIASN apabila terdapat pegawai **pindahan** dari luar KKP yang belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN;
 - 3) bagi pegawai yang tidak menyusun perencanaan SKP, tidak mengisi rencana aksi, mengisi bukti dukung, mengisi realisasi dan dinilai SKP nya oleh Pimpinan Organisasi **wajib** di monitoring dan dilakukan penilaian SKP untuk menghindari adanya disparitas data kinerja pada aplikasi SIASN.
 - c. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25 dengan melihat level jabatan (struktural, Fungsional Ahli dan Terampil, dan pelaksana) yang memiliki nilai yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya monitoring dari pengelola data SIASN untuk verifikasi data jabatan terakhir dan data riwayat pendidikan, saat ini seluruh ASN di lingkungan KKP dapat melihat kondisi data profile pribadi dan data riwayat pribadinya serta kelengkapan data dokumen elektroniknya pada **Portal Pegawai** di aplikasi Portal KKP.
5. Upaya Optimalisasi dan menghindari trafik sinkronisasi data di akhir penutupan pada tanggal 31 Desember 2026, Saudara dapat menugaskan pengelola data kepegawaian, untuk :
- a. monitoring dan mengingatkan seluruh pegawai di unit organisasinya pada **awal triwulan IV 2026** untuk mengupdate data pendidikan dan pelatihan pimpinan bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, diklat Fungsional bagi pejabat fungsional ahli dan terampil serta diklat teknis dan diklat 20 JP bagi

- PNS dan diklat 24 JP bagi PPPK;
- b. melakukan updating data penjatuhan hukuman disiplin pada **aplikasi i-dis** BKN di lingkungan KKP;
 - c. melakukan **pendataan** dan melaporkan ke kami, siapa saja ASN yang **tidak memiliki predikat SKP** tahun 2025;
 - d. updating data **pencantuman gelar** bagi ASN yang sudah memiliki ijazah pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aplikasi SIASN.

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Lampiran Surat
 Nomor : B.190/DJPK.1/TU.210/I/2026
 Tanggal : 12 Januari 2026

**Tabel Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Lingkup
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Semester II Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	23,04	28,66	24,67	5	81,58
2.	Direktorat Konservasi Ekosistem	22,78	33,62	25	5	86,4
3.	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	23,55	32,1	25	5	85,65
4.	Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,52	28,93	25,91	5	83,36
5.	Direktorat Jasa Bahari	23,67	30	26,33	5	85
6.	Direktorat Sumber Daya Kelautan	23,03	31,36	26,45	5	85,83
7.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang	21,75	35,18	27,11	5	89,04
8.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak	21,93	34,73	24,77	5	86,43
9.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar	22,5	34,52	27,8	5	89,82
10.	Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar	21,94	34,5	25,41	5	86,85
11.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong	21,79	34,02	25,18	5	85,98
12.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	21,49	34,68	26,28	4,91	87,36
13.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	22,18	37,05	27,82	5	92,05
14.	Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang	22,5	33,42	27,5	5	88,42

Keterangan :

Nilai diatas dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN melalui tautan <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/>

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Plt. Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Lampiran : Satu berkas

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
Secara Elektronik**
Sutrisno Subagyo

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan

All

 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	032.07.290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	98,33	100,00	83,33	100,00
2	032.07.477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	97,86	100,00	100,00	85,70
3	032.07.477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANK	98,57	100,00	85,71	100,00
4	032.07.477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00
5	032.07.477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	98,57	100,00	85,71	100,00
6	032.07.477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	99,24	100,00	100,00	94,95
7	032.07.499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00
8	032.07.499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00
9	032.07.623145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20
10	032.07.691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.07.691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.07.691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.07.691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.07.691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.07.691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.07.691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.07.691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.07.691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.07.691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.07.691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.07.691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.07.691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.07.691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.07.691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.07.691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.07.691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.07.691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.07.691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.07.691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.07.691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.07.691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.07.691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.07.691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.07.691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.07.691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.07.691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.07.691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.07.691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.07.691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.07.691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.07.691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
42	032.07.691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
43	032.07.691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 43 dari 43 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

132	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.46	96.46	50.00	100.00	93.02	100.00	89.76	100%	0.00	89.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	19.29	5.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.23		84.87				100.00				
133	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	83.18	65.99	93.33	100.00	97.26	100.00	89.73	100%	0.00	89.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	13.20	9.33	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		89.14				100.00				
134	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.64	86.67	82.00	98.08	74.10	100.00	89.55	100%	0.00	89.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	17.33	8.20	9.81	7.41	25.00				
					Nilai Aspek	89.32		85.21				100.00				
135	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.50	95.75	0.00	0.00	0.00	93.00	44.73	50%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25				
					Nilai Aspek	88.25		95.75				93.00				
136	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	66.20	99.37	50.00	100.00	95.96	100.00	89.40	100%	0.00	89.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	19.87	5.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	83.10		86.33				100.00				
137	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	70.29	100.00	50.00	100.00	86.84	100.00	89.23	100%	0.00	89.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	20.00	5.00	10.00	8.68	25.00				
					Nilai Aspek	85.15		84.21				100.00				



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.233 /DJPK.1/TU.210/I/2026 14 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan IV Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
3. Katimja Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 562/ITJ.0/RC.510/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan IV Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan s/d periode Triwulan IV Tahun Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 85,77%.
3. Rincian perkembangan capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen per 19 Desember 2025 dengan 70 temuan dan 144 saran rekomendasi dan nilai keuangan Rp.0,00 yaitu :
 - a. Tindak lanjut status tuntas sebanyak 38 saran/rekomendasi
 - b. Tindak lanjut status proses sebanyak 56 saran/rekomendasi
 - c. Tindak lanjut status pending sebanyak 50 saran/rekomendasi
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke I Tahun 2026 sebagaimana terlampir;
- 5.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Miftahul Huda

Tembusan:
Direktur Jenderal PK

Data Rekapitulasi Capaian IKU
 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
 Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan IV Tahun 2025

No	Satker	Rekomen dasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	61	15	81	46	81	88,5
2	Dit. KE	18	3	80	15	80	80
3	Dit. P3K	19	4	81	15	81	94,3
4	Dit. Jasbar	11	4	80	7	80	96,5
5	Dit. SDK	2	0	80	0	80	95,2
6	Dit. KSG	3	1	81	2	81	97,2
7	BKKPN Kupang	2	0	80	2	80	98,4
8	BPSPL Makasar	1	1	100	0	0	100
9	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Sorong	2	1	80	1	80	98
11	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
12	LKKPN Pekanbaru	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Denpasar	15	1	80	14	80	87
14	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
Jumlah		134	30	-	102	-	85,7

a.n. Direktur Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Pengelolaan Kelautan,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Miftahul Huda

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS
NOMOR 127/DJPK.1/TU.210/I/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Ketua Tim Kerja SDMAO
Hal : Capaian Nilai Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 Januari 2026

Berkenaan dengan pencapaian target terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada indikator kinerja Pembangunan Integritas dan Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM ditingkat UPT, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Capaian indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan nilai total minimal 75;
2. Capaian indikator kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM diperoleh melalui unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan nilai total minimal 85.

Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih dan mohon arahan lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 127 /DJPK.1/TU.210/I/2026
Tanggal : 14 Januari 2026

Hasil Capaian Nilai WBK

No	Unit Kerja	Waktu Penilaian	Nilai WBK
1	BKKPN Kupang	Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 12 Juni 2025	89,52
2	LKKPN Pekanbaru	Hasil Pemantauan Pengusulan WBBM TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Maret 2025	91,04
3	BPSPL Padang	Hasil Seleksi Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 20 September 2024	90,40
4	BPSPL Pontianak	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	90,81
5	BPSPL Denpasar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,57
6	BPSPL Makassar	Hasil Pemantauan Penilaian TPI KKP Tahun 2022	87,41
7	LPSPL Serang	Hasil Pemantauan Pengusulan WBK TPN oleh Inspektorat Jenderal tanggal 10 Juni 2025	80,04
8	LPSPL Sorong	Hasil Penilaian TPI KKP Tahun 2021	81,64

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOTA DINAS
NOMOR 119/DJPK.1/TU.210/I/2026

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan
Lingkup Ditjen PK Tahun 2025
Tanggal : 14 Januari 2026

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan telah menindaklanjuti temuan kepatuhan dan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Adapun temuan tersebut antara lain 2 (dua) temuan kepatuhan senilai Rp357.650.852,00 yang sudah disetor ke Kas Negara per 15 Mei 2025 dan 2 (dua) temuan SPI yang sudah disampaikan tanggapan sepakat dan telah dilengkapi dokumen dukung yang dimaksud. Rincian 4 (empat) temuan kepatuhan tersebut sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 tidak sesuai ketentuan pada Ditjen PK senilai Rp109.734.338,00;
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja 526 tidak sesuai kontrak pada Ditjen PK senilai Rp247.916.514,00;

Sedangkan rincian 2 (dua) temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terdiri dari:

1. Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan;
2. Pembayaran Upah Tenaga Kerja melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan.

Demikian kami melaporkan, sekaligus mohon arahan Bapak lebih lanjut.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda

Matrik TLHP BPK RI LK 2024

No.	Temuan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Eselon I	Satker	TL Kepatuhan Perundang-Undangan			TL SPI		
						Nilai Keuangan	TL Keuangan	Sisa	Tindak Lanjut	Keterangan	Hasil Telaahan
1	Pertanggungjawaban Belanja Barang Non 526 tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait supaya : a. Memerintahkan KPA satker terkait untuk : 1). Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; 2). Memerintahkan PPK satker terkait untuk lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak, memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dan menguji serta menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. b. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran belanja barang non 526 sebesar Rp125.816.155,00 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.370.000,00 dengan menyetorkannya ke kas negara atau rekening operasional BLU.	2	Ditjen PK	Sekretariat Ditjen PKRL	69.364.338,00	69.364.338,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara NTPN No. CDC2461QVD8EQ2GQ Tanggal 14 Mei 2025 Rp69.364.338,00	Kekurangan volume pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL	
				Ditjen PK	Sekretariat Ditjen PKRL	40.370.000,00	40.370.000,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara NTPN No. BFBEE61QVD8DT0CI Tanggal 14 Mei 2025 Rp40.370.000,00	Denda Keterlambatan pekerjaan penataan ruang rapat dan ruang kerja pimpinan Ditjen PKRL	
2	Pelaksanaan pekerjaan konstruksi belanja 526 tidak sesuai kontrak sebesar Rp431.621.842,00	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen PB, Dirjen PDSPKP, dan Dirjen PKRL selaku KPA supaya : a. Lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas PPK yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; b. Memproses sesuai ketentuan yang berlaku atas kelebihan pembayaran sebesar Rp431.621.842,00	2	Ditjen PKRL	Sekretariat Ditjen PKRL	31.401.720,00	31.401.720,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp31.401.720,00 NTPN No. 2D8880NA0DPSH0 GP Tanggal 2 Mei 2025	Pengadaan pondok informasi wisata bahari Kab. Kendal	
					Sekretariat Ditjen PKRL	9.410.217,00	9.410.217,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp9.410.217,00 NTPN No.064C748VVO17VIJ D Tanggal 28 April	Pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN) Cirebon	

No.	Temuan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Eselon I	Satker	TL Kepatuhan Perundang-Undangan			TL SPI		
						Nilai Keuangan	TL Keuangan	Sisa	Tindak Lanjut	Keterangan	Hasil Telaahan
					Sekretariat Ditjen PKRL	207.104.577,00	207.104.577,00	-	Telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar Rp207104577,00 NTPN No.783451JNG8CGND	Pengadaan bangunan dan mesin washing plan Bima	
3	Penatausahaan Belanja Operasional dan Belanja Nonoperasional tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya supaya : a. Menghentikan kebijakan merealisasikan belanja operasional dan belanja nonoperasional yang tidak sesuai peruntukan dan melebihi SBM b. Memerintahkan KPA pada masing-masing satker terkait untuk : 1). Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, dan 2). Memerintahkan agar PPK pada masing-masing satker terkait untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan Belanja Operasional dan Nonoperasional	2	1. Ditjen PT 2. Setjen 3. Itjen 4. Ditjen PB 5. Ditjen PKRL 6. Ditjen PSDKP 7. Ditjen PDSPKP 8. BPPMHKP 9. BPPSDM	1. Setditjen PKRL 2. Direktorat Lingkup DJPKRL 3. UPT Lingkup DJPKRL					1. Kegiatan Bakti Nelayan pada Ditjen Perikanan Tangkap 2. Realisasi Belanja Barang Nonoperasional untuk pengadaan seminar kita belum sepenuhnya sesuai ketentuan	
4	Pembayaran Upah Tenaga Kerja melalui Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan : a. Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait supaya menghentikan kebijakan pengangkatan pegawai oleh PPK yang tidak memedomani ketentuan manajemen pegawai dan; b. Sekretaris Jenderal KKP memerintahkan Kepala Biro SDMAO untuk berkoordinasi dengan Eselon I terkait dalam pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkup KKP	2	1. Itjen 2. Ditjen PT 3. Ditjen PB 4. Ditjen PKRL 5. Ditjen PSDKP 6. BPPSDMKP 7. Setjen 8. Ditjen PDSPKP 9. BPPMHKP	1. Setditjen PKRL 2. Direktorat Lingkup DJPKRL 3. UPT Lingkup DJPKRL					1. Terdapat 89 orang tenaga kerja PJLP dengan lingkup pekerjaan/jabatan ASN 2. KKP tidak memiliki standar biaya upah tenaga kerja PJLP 3. Pengadaan tenaga kerja yang melaksanakan tugas Non ASN tidak dilaksanakan melalui penyediaan jasa alih daya (outsourcing)	
Jumlah			8			357.650.852,00	357.650.852,00	0			



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

■ Nomor : B.3743/DJPK.1/RC.610/XII/2025 23 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2025 pada BPSPL Makassar

Yth. Kepala BPSPL Makassar

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan serta memperhatikan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025 pada BPSPL Makassar sebagai berikut:

1. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengukur sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan pada BPSPL Makassar, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dan konsisten, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Hasil Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal). yang diinput melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id>).
3. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BPSPL Makassar memperoleh nilai 92 dari nilai maksimum 100 dengan predikat A (Memuaskan), sebagaimana uraian pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada BPSPL Makassar Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2025
1	Perencanaan Kinerja	30	27.60
2	Pengukuran Kinerja	30	27.60
3	Pelaporan Kinerja	15	13.80
4	Evaluasi Internal	25	23.00
Nilai Hasil Evaluasi		100	92
Predikat Penilaian			AA

4. Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja Tahun 2025 pada BPSPL Makassar telah tersedia, dipublikasikan dan dipertahankan setidaknya selama 5 tahun yaitu sejak tahun 2020. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu berorientasi hasil, dengan ukuran kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*, dan *Time-bound* (SMART), menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dan pemenuhan kriteria tersebut. Perencanaan kinerja juga telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi.

Adapun, beberapa upaya yang dapat dihargai dalam pemenuhan kriteria kualitas dan pemanfaatan tersebut dengan telah membuat hasil analisis SMART terhadap seluruh Indikator Kinerja dan upaya inovatif yang telah dilakukan dalam mendukung pemenuhan kriteria pemanfaatan perencanaan kinerja, yaitu telah mengembangkan platform Layar Pinisi (<https://layarpinisi.id/>) untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengecek status pemanfaatan ruang yang menjadi informasi dasar bagi pemanfaatan ruang. Dengan adanya platform ini mempermudah untuk merencanakan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan BPSPL Makassar dan Implementasi aplikasi Layar Pinisi memungkinkan proses verifikasi, klarifikasi data, dan monitoring penyedia jasa dilakukan secara digital melalui unggahan dokumen, pelacakan otomatis, dan komunikasi daring. Dengan demikian, pegawai tidak lagi perlu melakukan survei lapangan secara rutin seperti sebelum inovasi ini dilakukan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran, sehingga dinilai A.

b. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan. BPSPL Makassar memiliki Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan data kinerja yang telah dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun terakhir (sejak 2020). Pengukuran kinerja juga telah dijadikan kebutuhan, dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, serta menjadi dasar dalam pemberian Reward and Punishment dan penyesuaian strategi.

Pada kriteria kualitas pengukuran kinerja BPSPL Makassar menunjukkan upaya inovatif yang signifikan melalui pengembangan *platform* MANTAP PUANG (<https://linktr.ee/Monkinkeu>). *Platform* ini berfungsi sebagai pusat informasi terpadu yang menyajikan data terkait pelayanan, keuangan, dan kinerja BPSPL Makassar. Inovasi ini berdampak positif mempermudah penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja sesuai kaidah SAKIP, dan memastikan realisasi anggaran dan output kegiatan dapat dilacak dan dievaluasi secara objektif, yang secara langsung mendukung efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja.

Adapun terhadap kriteria pemanfaatan pengukuran kinerja BPSPL Makassar telah memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara nyata melalui penerapan mekanisme pemberian *Reward and Punishment* dalam mendukung kinerja internal. Program apresiasi ini melaksanakan setiap tahun dengan melakukan penilaian kinerja individu berdasarkan pedoman pembangunan Zona Integritas dan kertas kerja dimana parameter yang dilakukan penialain antara lain Sikap dan Perilaku, Kerja Sama, Disiplin, Profesionalitas, Integritas, Responsivitas dan Inovatif) sehingga dinilai A.

c. Pelaporan Kinerja

BPSPL Makassar telah memenuhi kriteria pelaporan kinerja dengan baik, ditandai dengan tersedianya Dokumen Laporan Kinerja (LKj) yang menggambarkan capaian kinerja dan telah dipertahankan setidaknya selama 5 (lima) tahun terakhir. Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sangat komprehensif mencakup informasi tentang pencapaian kinerja, analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, analisis perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis perbandingan realisasi dengan target jangka menengah, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, program kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja, serta perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

BPSPL Makassar menunjukkan upaya inovatif yang patut dihargai dalam meningkatkan kualitas pelaporan sehingga dinilai A, yaitu:

- 1) Pengembangan Platform Layar Pinisi: BPSPL Makassar telah mengembangkan platform Layar Pinisi (<https://layarpinisi.id/>) yang secara langsung mendukung kualitas pelaporan dan pelayanan publik. Platform ini mempermudah pelaku usaha untuk mengecek status pemanfaatan ruang laut. Ketersediaan informasi dasar ini sangat membantu dalam perencanaan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan BPSPL Makassar;
- 2) Keterbukaan Informasi Publik: Sebagai pengakuan atas kualitas dan transparansi pelaporan, BPSPL Makassar telah berhasil meraih Predikat Informatif dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025.

sedangkan pada kriteria pemanfaatan, Pelaporan kinerja telah dimanfaatkan secara strategis untuk perencanaan anggaran berkelanjutan. Hasil analisis pelaporan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode berikutnya. Hal ini terlihat dari peningkatan target PNBP dari Rp.500.000.000 pada tahun 2024 menjadi Rp543.000.000 pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam DIPA Satker BPSPL Makassar sehingga dinilai A.

d. Evaluasi Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada BPSPL Makassar menunjukkan kualitas pelaksanaan yang sangat baik dan konsisten selama lima tahun terakhir. Pelaksanaan evaluasi telah disesuaikan dengan perkembangan regulasi, mulai dari Rekonsiliasi Kinerja (Tahun 2020–2022) hingga Penilaian Mandiri (PM) SAKIP (Tahun 2023–2024), dengan seluruh kriteria telah terpenuhi.

BPSPL Makassar telah melakukan upaya inovatif dan sistematis dalam menjamin kualitas evaluasi internal, di antaranya adalah:

- 1) **Sertifikasi ISO 9001:2015:** Pengakuan terkait Sistem Manajemen Mutu (berlaku sd 29 Desember 2026);
- 2) **Sertifikasi ISO 37001:2016:** Pengakuan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (berlaku sd 26 Agustus 2027).

Sertifikasi standar internasional ini menjadi bukti nyata komitmen BPSPL Makassar dalam membangun sistem evaluasi dan manajemen internal yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas, sehingga dinilai A.

Hasil dari evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan secara efektif untuk mendorong perbaikan yang berdampak pada pengakuan eksternal. Pemanfaatan ini dibuktikan dengan keberhasilan BPSPL Makassar meraih Penghargaan dan Predikat Pelayanan Prima Tahun 2024 dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga pada kriteria ini dinilai A.

5. Tindakan lanjut hasil pengawasan periode sebelumnya

Berdasarkan Evaluasi AKIP Tahun 2024 terdapat 2 rekomendasi yaitu:

- 1) Pada indikator penggunaan SBK BPSPL Makassar untuk memperhatikan indeks Realisasi Anggaran tidak melebihi dari indeks SBK;
- 2) Pada indikator efisiensi SBK BPSPL Makassar mohon memperhatikan Indeks Realisasi Anggaran tidak lebih dari 20% dibawah indeks SBK, Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) harus tercapai sesuai Target Volume Rincian Output (TVRO), realisasi anggaran tidak boleh terserap maksimal, dan indeks realisasi anggaran jangan melebihi dari 20% dibawah SBK.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPSPL Makassar melalui surat B.221/BPSPL.1/TU.440/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

6. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat kelemahan dalam implementasi SAKIP BPSPL Makassar Tahun 2025 terkait penyesuaian dokumen perencanaan kinerja, yaitu:

Adanya penambahan anggaran PNBPN sebesar Rp103,145 miliar (optimasi persetujuan penggunaan PNBPN dari 10% menjadi 23%) melalui Revisi DIPA TA 2025 tanggal 31 Oktober 2025. Perubahan signifikan ini berdampak langsung pada peningkatan pelayanan perizinan dan dukungan PNBPN lingkup Ditjen PKRL, yang seharusnya diikuti dengan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) level 2 Pusat dan UPT. Namun, hingga saat evaluasi, BPSPL Makassar belum mengusulkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut.

7. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPSPL Makassar direkomendasikan untuk:

Menindaklanjuti perubahan anggaran dengan Membuat Nota Dinas usulan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Setditjen.

Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SAKIP tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti **sampai dengan akhir Desember 2025**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Direktur Jenderal PK
Sekretaris Direktorat Jenderal PK



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Miftahul Huda

Tembusan:

1. Dirjen PK
2. Dirjen PRL
3. Inspektur I
4. Kepala Biro Perencanaan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudiarso**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar

Permana Yudiarso

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4
		2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	175
2	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2
4	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	87

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		11 . Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95
		12 . Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		13 . Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		14 . Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	80
		15 . Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76
		16 . Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	25.088.930.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	875.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	13.546.590.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2025		39.810.520.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar

Permana Yudiarso



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Muhammad Ishak Yusma

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(BPSPL) MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	2

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan Ruang Laut	3.900.776.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2025		3.900.776.000

Keterangan: Blokir anggaran sebesar Rp505.000.000 sehingga Pagu Efektif BPSPL Makassar Tahun 2025 sebesar Rp3.395.776.000.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Muhammad Ishak Yusma



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Muhammad Ishak Yusma**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Muhammad Ishak Yusma

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar (Provinsi)	4
2	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	40
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
4.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	80
5.	Tersusunnya dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup BPSPL Makassar	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	89
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPSPL Makassar (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4
		10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	80
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPSPL Makassar (%)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		13.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK BPSPL Makassar (Nilai)	75
		14.	Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar (Nilai)	70
		15.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPSPL Makassar (%)	76
		16.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik UPT Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	25.088.930.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	12.509.617.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2025		37.898.547.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Muhammad Ishak Yusma



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada Unit Kerja:

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR

Atas Nilai Capaian Kinerja Organisasi **Predikat Istimewa (110.23)**
Triwulan IV Tahun 2025

Jakarta, 30 Januari 2026

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

A. Koswara



2025 EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS pangarbinu 08

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR B.70/MEN-KP/I/2026

Diberikan kepada :

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
secara Mandiri Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal KKP dan
Supervisi Tim Penilai Nasional Kementerian PAN RB
Periode Penilaian 2024 s.d. Oktober 2025

Jakarta, 3 Februari 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

BerAKHLAK





JALAN MAKMUR DG. SITAKKA NO. 129, MAROS SULAWESI SELATAN 90511 - Telp/ Fax. 0411 - 371337
Email: bpsplmakassar@kkp.go.id